

**PERAN PEMERINTAH DALAM MENGURANGI ANGKA
KEMISKINAN DI KECAMATAN PANTAN CUACA
KABUPATEN GAYO LUES**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Kalida Munastri
NIM. 200801032



**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UIN AR-RANIRY AR-RANIRYBANDA ACEH
2024 M/ 1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Kalida Munastri
Nim : 200801032
Program Studi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Pantan Cuaca, 31 Desember 2002
Alamat : Desa Seneren, Kecamatan Pantan Cuaca

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
- 4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari, terdapat tuntutan atau bukti yang menunjukkan pelanggaran terhadap pernyataan dan disampaikan sebelumnya, peneliti bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan UIN Ar- Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 09 Agustus 2024
Menyatakan,



Kalida Munastri
Kalida Munastri

**PERAN PEMERINTAH DALAM MENGURANGI ANGKA KEMISKINAN
DI KECAMATAN PANTAN CUACA KABUPATEN GAYO LUES**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan
Skripsi Pada Program Sarjana (S.I) Ilmu Politik

Oleh

Kalida Munastri

NIM. 200801032

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Prodi Ilmu Politik

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing

جامعة الرانيري

AR-RANIRY



Eka Januar. M.Soc.Se

NIP.197702191998032001

**PERAN PEMERINTAH DALAM MENGURANGI ANGKA
KEMISKINAN DI KECAMATAN PANTAN CUACA
KABUPATEN GAYO LUES**

SKRIPSI

KALIDA MUNASTRI
200801032

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN AR-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Politik

Pada Hari/Tanggal: 16 Agustus 2024 M

Darussalam Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua

Sekretaris


Eka Januar, M.Soc.Sc.
NIP. 197702191998032001


Elita Zahara, S.E
NIP. 197607212009102002

Penguji I

Penguji II


Ramzi Murziqin, S.H.I., M.A.
NIP. 198605132019031006


Danil Akbar Taqwadin, B.IAM, M.Sc.
NIP. 198904082023211022

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Darussalam- Banda Aceh




Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197403271999031005

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya." (QS. Albaqarah: 286)

Harus ada spasi agar tulisan bisa terbaca, harus ada jeda agar kalimat bisa tereja, harus ada henti agar langkah salah dapat diperbaiki, mari terus mendewasa, agar mengerti kapan harus berhenti dan kapan melangkah lagi." -Ustadzah Halimah Alaydrus-

PERSEMBAHAN

Tiada lembar skripsi yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan, Bismillahirrahmanirrahim skripsi ini saya persembahkan untuk:

Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan pertolongan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Kedua orang tua saya tercinta Bapak Ismail dan Ibu Erna Wati yang selalu melangitkan doa-doa baik dan menjadikan motivasi untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih sudah mengantarkan saya sampai ditempat ini, saya persembahkan karya tulis sederhana ini dan gelar untuk bapak dan ibu.

Kepada saudara-saudara saya, Ramadan, Evirahma, dan Ainun Karyana, terima kasih atas doa dan dukungan yang telah diberikan. Dorongan dan motivasi dari kalian sangat membantu penulis menyelesaikan studi hingga meraih gelar sarjana.

Terima kasih kepada keponakan tercinta, Elicya Azalea Ramadan, atas kebahagiaan dan kelucuan yang selalu membuat penulis bersemangat dan merasa senang, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Diri saya sendiri, Kalida Munastri karena telah mampu berusaha dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri walaupun banyak tekanan dari luar keadaan dan tidak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini.

Bapak dan Ibu Dosen Sarjana Ilmu Politik yang telah membimbing dan mengarahkan saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

Sahabat dan teman-teman saya yang telah menemani dalam suka maupun duka. Terima kasih atas segala waktu, usaha dan dukungan yang telah diberikan. Akhir kata semoga skripsi ini dapat menjadi wawasan dan manfaat untuk orang lain.

Aamiin

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Peran Pemerintah dalam Mengurangi Angka Kemiskinan di Kecamatan Pantan Cuaca, Kabupaten Gayo Lues. Meskipun menunjukkan penurunan dari tahun 2021 hingga 2023, Kecamatan Pantan Cuaca masih termasuk salah satu dari empat kecamatan miskin di Kabupaten Gayo Lues. Pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai program untuk mengatasi kemiskinan, termasuk Usaha Ekonomi Produktif (UEP), penyediaan modal usaha, perbaikan sanitasi, penanganan rumah tidak layak huni, dan pembangunan infrastruktur seperti jalan. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan fokus pada perbaikan sanitasi dan peningkatan pendapatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemerintah berperan dalam menurunkan angka kemiskinan di wilayah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan di Kecamatan Pantan Cuaca telah memberikan dampak yang sangat positif dan memuaskan. Implementasi program-program pemerintah terbukti efektif dalam menurunkan angka kemiskinan dan secara signifikan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan ini tidak hanya mencerminkan penurunan angka kemiskinan tetapi juga membawa perubahan substansial dalam kualitas hidup warga. Meskipun pencapaian ini sangat menggembirakan, upaya lebih lanjut diperlukan untuk memastikan keberlanjutan hasil positif. Optimalisasi program, perbaikan data survei, dan pemanfaatan sumber daya alam yang lebih efisien akan sangat penting untuk terus mengembangkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dan merata.

Kata Kunci: Peran Pemerintah, Kemiskinan, Masyarakat

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamini, segala puji dan syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang mana berkat dan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan izin Allah SWT serta bantuan semua pihak penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul "Peran Pemerintah Dalam Mengurangi Angka Kemiskinan Di Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues". Shalawat dan salam selalu kami curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menarik tangan umatnya dari zaman jahiliah ke alam kecerdasan yang kita rasakan saat ini.

Penyusunan skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam program studi Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Penyelesaian tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, petunjuk dan do'a dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, penghargaan dan terima kasih yang terdalam dan tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Sebagai ungkapan terima kasih, skripsi ini penulis persembahkan kepada orang tua tercinta, yaitu cinta pertama dan panutanku Ayahanda Ismail dan Pintu surgaku Ibunda Erna Wati, yang selalu menjadi penyemangat penulis sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia, yang tiada hentinya selalu memberikan kasih sayang, do'a dan motivasi dengan penuh keikhlasan yang

tak terhingga kepada penulis. Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis. I love you more more more.

2. Kepada cinta kasih ketiga saudara-saudara saya, Ramadan, Evirahma, dan Ainun Karyana terima kasih banyak atas do'a dan dukungan moril maupun materil, terima kasih juga atas segala dorongan dan motivasi yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
3. Kepada keponakan tercinta Elicya Azalea Ramadan terimakasih atas kelucuan-kelucuan yang membuat penulis semangat dan selalu membuat penulis senang, sehingga penulis semangat untuk mengerjakan skripsi ini sampai selesai.
4. Kepada Prof. Dr. H. Mujiburrahman, Mag, selaku rektor UIN Ar-Raniry.
5. Dr. Muji Mulia, M.Ag. selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
6. Rizkika Lhena Darwin, M.A. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik. Ramzi Murziqin, S.H.I.,M.A., selalu skretaris prodi ilmu politik, dan Aklima,S Fil.,I, M.A. Selaku Penasehat Akademik.
7. Terima kasih banyak kepada bapak Eka Januar, M. Soc.Sc. selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam membimbing, mengarahkan, mengajarkan dalam proses penulisan dan pengerjaan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan.
8. Bapak dan ibu dosen serta seluruh staf akademik dan pengawain fakultas ilmu sosial dan ilmu pemerintahan UIN Ar-Raniry yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya unrtuk diwawancarai dalam memberikan informasi terkait penulisan skripsi

ini. Seluruh keluarga serta kerabat yang menjadi penyemangat untuk menyelesaikan proposal ini.

10. Kepada Sobat Ambyar yaitu: Hawa Comel, Kasmiranda, Harlinda Yanti, Mega Maysari, dan Sulis Murni yang telah rela meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam proses penyelesaian skripsi ini.

11. Untuk diri saya Kalida Munastri terimakasih telah kuat sampai detik ini, yang mamapu mengendalikan diri dari tekanan luar. Yang tidak menyerah sesulit apapun rintangan kuliah ataupun proses penyusunan skripsi, yang mampu berdiri tegak ketika di hantam permasalahan yang ada. Terimakasih diriku semoga tetap rendah hati, ini baru awal dari permulaan hidup tetap semangat kamu pasti bisa.

Semoga segala bentuk dukungan, bantuan kerjasama, aluran tangan yang telah diberikan dengan ikhlas hati akan mendapatkan balasan sari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan yang diperbaiki. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang konstruktif dan wawasan bagi setiap pembacanya serta bagi pengembangan program studi ilmu politik.

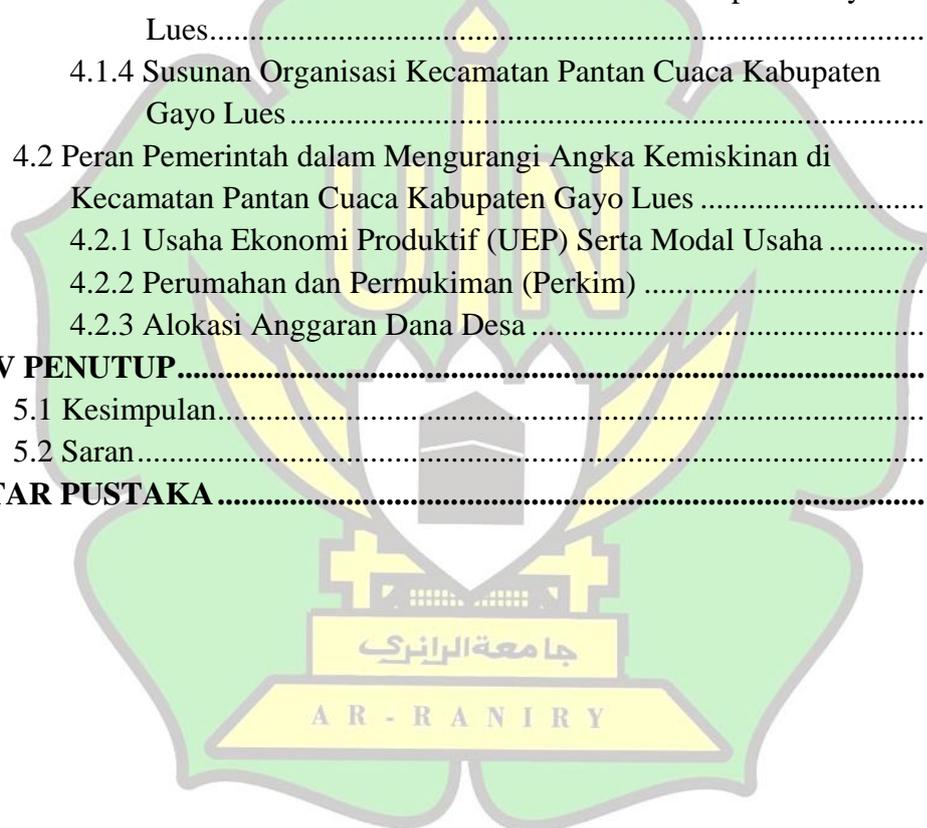
Banda Aceh, 14 Agustus 2024
Penulis

Kalida Munastri

DAFTAR ISI

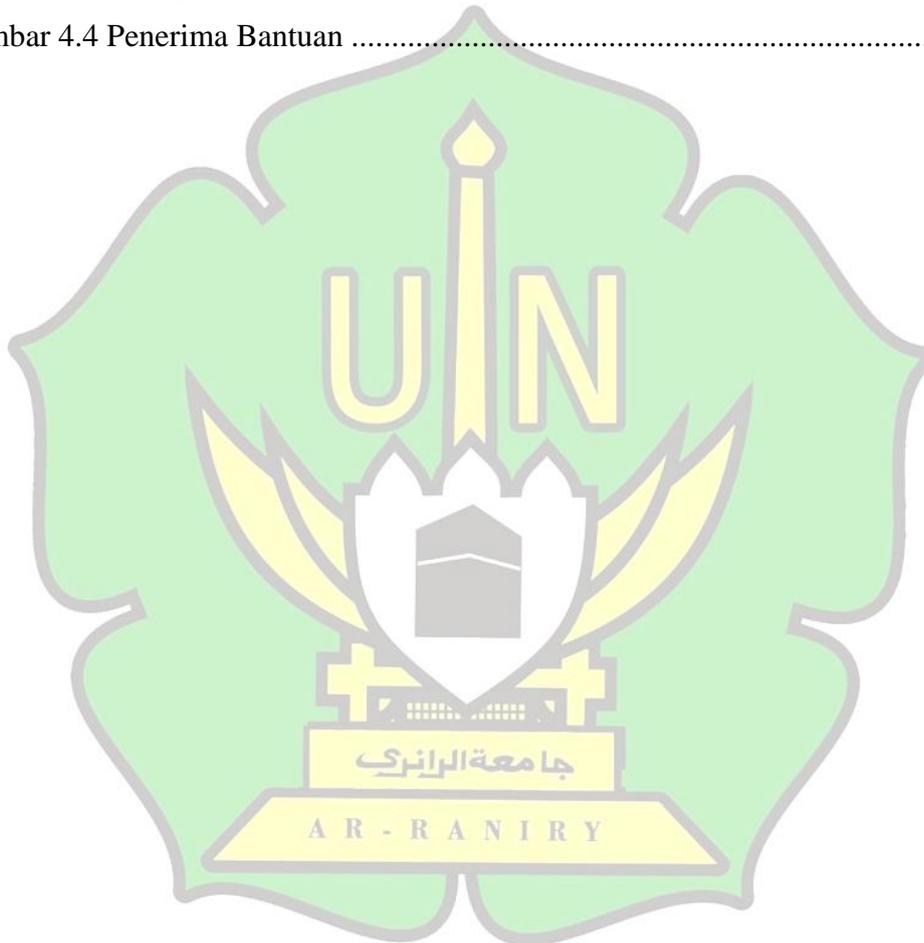
LEMBARAN JUDUL	
PERYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Fokus Kajian	11
1.3 Rumusan Masalah	11
1.4 Tujuan Penelitian.....	12
1.5 Manfaat Penelitian.....	12
1.5.1 Manfaat Teoritis	12
1.5.2 Manfaat Praktis	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Penelitian Terdahulu	14
2.2 Landasan Teoritis	18
2.1.1 Teori Peranan Pemerintah	18
2.1.2 Pemerintah.....	21
2.1.3 Kebijakan Pemerintah	22
2.3 Konsep Kemiskinan	23
2.4 Faktor Ekonomi.....	24
2.5 Faktor Sosial.....	25
2.6 Faktor Politik.....	26
2.7 Kerangka Berpikir	27
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1 Pendekatan Penelitian	29
3.2 Lokasi Penelitian	30
3.3 Sumber Data	30
3.3.1 Data Primer	31
3.3.2 Data Sekunder	31
3.4 Informan Penelitian	31
3.5 Teknik Pengumpulan Data	32

3.5.1 Obsevasi	32
3.5.2 Wawancara	32
3.5.3 Dokumentasi	33
3.6 Teknik Analisis Data	33
3.6.1 Pemeriksaan Ulang	34
3.6.2 Klasifikasi Data	34
3.6.3 Pembuktian	34
3.6.4 Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
4.1 Hasil Penelitian	37
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
4.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi	39
4.1.3 Visi dan Misi Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues.....	41
4.1.4 Susunan Organisasi Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues	41
4.2 Peran Pemerintah dalam Mengurangi Angka Kemiskinan di Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues	43
4.2.1 Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Serta Modal Usaha	46
4.2.2 Perumahan dan Permukiman (Perkim)	49
4.2.3 Alokasi Anggaran Dana Desa	52
BAB V PENUTUP.....	64
5.1 Kesimpulan.....	64
5.2 Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues	37
Gambar 4.2 Renovasi Rumah Tidak Layak Huni	50
Gambar 4.3 Data Wawancara Dari Dinas Sosial Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues	55
Gambar 4.4 Penerima Bantuan	57



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan.....	32
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Miskin untuk Distribusi Alokasi Bansosn 2024....	55



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertayaan Penelitian	68
Lampiran 2 Surat Penelitian	70
Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara	71



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya, namun di sisi lain menghadapi masalah kemiskinan dan pengangguran yang signifikan. Pada dasarnya kemiskinan secara umum hal yang sangat sulit diatasi, apalagi bagi negara berkembang. Kemiskinan menjadi kata yang sangat menakutkan karena semua orang pasti tidak mau menjadi miskin. Dalam upaya mengatasi kemiskinan, dilakukan berbagai proses pemberdayaan bagi penduduk miskin yang meliputi lima aspek penting.

Pertama, pengembangan sumber daya manusia yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan penduduk. Kedua, penyediaan modal kerja untuk mendukung usaha kecil dan menengah. Ketiga, penciptaan peluang dan kesempatan berusaha bagi penduduk miskin agar dapat mandiri secara ekonomi. Keempat, pengembangan kelembagaan yang mendukung penduduk miskin dalam mengakses berbagai sumber daya dan informasi. Terakhir, penciptaan sistem pelayanan yang sederhana dan efisien untuk mempermudah penduduk miskin dalam mendapatkan bantuan dan layanan.

Dengan pendekatan ini, diharapkan penduduk miskin dapat memberdayakan diri mereka sendiri, mengatasi kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan mereka secara memadai dan berkelanjutan. Permasalahan utama dalam usaha mengatasi kemiskinan di Indonesia saat ini berkaitan dengan

kenyataan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak merata di seluruh wilayah Indonesia, yang terbukti dengan tingginya perbedaan pendapatan antar daerah.¹

Selain itu, kemiskinan juga merupakan hubungan sebab akibat (kausalitas melingkar), yang berarti tingkat kemiskinan yang tinggi disebabkan oleh rendahnya pendapatan per kapita, dan pendapatan per kapita yang rendah terjadi karena investasi per kapita yang juga rendah. Kemiskinan merupakan permasalahan lama yang umum dihadapi oleh hampir semua negara berkembang, terutama negara berpenduduk padat seperti Indonesia. Kemiskinan seharusnya menjadi permasalahan bersama yang perlu mendapat perhatian serius. Kemiskinan bukan merupakan permasalahan individu, kelompok, atau bahkan pemerintah, melainkan permasalahan setiap warga negara Indonesia.

Menurut Critianto Leasiwal, kemiskinan di negara berkembang adalah masalah yang rumit karena kondisi tersebut mencerminkan tingkat kesejahteraan penduduk di negara atau daerah tersebut. Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan melalui kebijakan yang mendukung peningkatan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, kesehatan, serta penguatan infrastruktur dan sumber daya ekonomi lainnya. Kondisi kemiskinan suatu negara atau daerah juga merupakan cerminan dari tingkat kesejahteraan penduduk yang tinggal pada negara atau daerah tersebut.²

¹ Siti Rohima. (2015). *Intreprenuership dalam Pemberdayaan Diri Masyarakat Miskin*. Hlm 37.

² Christianto Leasiwal. *Determinan dan Karakteristik Kemiskinan di Provinsi Maluku*. Universitas Pattimura. Vol 7. No 2. Hal 1. Tahun 2017.

Isu kemiskinan kini telah mencapai skala dunia dan menuntut perhatian baik dari pemerintah maupun masyarakat secara keseluruhan. Tidak mungkin hanya pemerintah sendiri yang memperbaiki kemiskinan sebaliknya, kontribusi diperlukan dari semua pihak yang berkepentingan. Kemiskinan merupakan masalah penting yang harus ditangani di negara-negara berkembang di dunia, termasuk masalah kemiskinan di Indonesia.

Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks yang sulit diatasi, terutama di negara-negara berkembang. Meskipun beberapa negara telah berhasil meningkatkan produksi dan pendapatan nasional, namun banyak penduduknya yang masih hidup dalam kemiskinan. Orang yang hidup dalam kemiskinan tidak dapat memenuhi salah satu kebutuhan utama mereka, yang berupa kurangnya akses ke kesejahteraan yang layak. Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memunculkan masalah sosial, seperti pengangguran, kebodohan, dan ketidakadilan sosial.

Kemiskinan menjadi perhatian worldwide yang memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga internasional.³ Upaya untuk mengatasi kemiskinan memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan. Langkah-langkah untuk mengurangi kemiskinan antara lain adalah peningkatan akses terhadap pendidikan dan pelatihan kerja, pembangunan infrastruktur ekonomi, pemberian bantuan sosial yang tepat sasaran, serta penguatan kebijakan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan.

³ Siti Hajra (2022) *Penanggulangan Kemiskinan: Antar Pemerintah dan Masyarakat di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare (Perspektif Ekonomi Islam)*

Gambaran peranan adalah merupakan aspek dinamis dari kedudukan apabila seseorang melaksanakan hal-hal serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia telah melakukan sebuah peranan. Ketentuan peranan adalah pernyataan formal dan terbuka tentang perilaku yang harus ditampilkan oleh seseorang dalam membawa perannya.⁴ Peran pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan sangatlah penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kebijakan dan program yang dapat memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat yang rentan terhadap kemiskinan. Melalui anggaran yang dialokasikan untuk program-program sosial dan ekonomi, pemerintah dapat memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, seperti program bantuan sosial, subsidi pendidikan, dan pelatihan kerja.

Secara etimologis, kata pemerintah berasal dari kata “perintah” yang kemudian diambil awalan “pe” menjadi kata “pemerintah” yang merujuk pada suatu badan atau lembaga elit yang melaksanakan pekerjaan administratif suatu negara. Pemerintah juga merupakan organisasi yang bertindak atas nama rakyat untuk melaksanakan tujuan negara, sekaligus proses penyelenggaraannya disebut pemerintahan dan besaran kekuasaan pemerintah berasal dari rakyat. Penyelenggaraan negara harus didasarkan pada kehendak rakyat, karena rakyat adalah jiwa kehidupan dan proses penyelenggaraan negara.⁵

⁴ Jusmaleara Senja (2013) *Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh*. Vol 6. Hlm 223. Tahun 2013.

⁵ Jusmaleara Senja (2013) *Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh*. Vol 6. Hlm 224. Tahun 2013.

Pemerintah memiliki peran penting dalam mencapai tujuan suatu negara. Proses pencapaian tujuan bagi setiap negara pada dasarnya sama, walaupun berbeda dalam rumusannya. Tujuan Negara Republik Indonesia sendiri tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar alinea ke IV, yaitu "Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial."⁶

Wilayah Aceh yang terletak di ujung barat Indonesia juga masuk dalam daftar wilayah dengan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi. Aceh termasuk dalam 10 besar provinsi termiskin di Indonesia yang berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021, Aceh menempati peringkat 6 provinsi termiskin di Indonesia dengan persentase penduduk miskin sebanyak 834,24 ribu orang. Dalam hal ini, Aceh merupakan salah satu daerah yang dicakup oleh KBI dan mempunyai tingkat kemiskinan yang relatif tinggi.⁷

Selain itu, Aceh memiliki sejumlah faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan, seperti tingkat pendidikan yang rendah, kesehatan yang buruk, dan tingkat pengangguran yang tinggi. Salah satu solusinya adalah dengan meningkatkan pendidikan dan kesehatan di wilayah tersebut. Pemerintah juga harus meningkatkan angka pengangguran dengan memberikan pelatihan dan dukungan keuangan kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah juga perlu

⁶ Tim Redaksi BIP. "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", Saptono Raharjo, cet. 1. (Penerbit Bhuna Ilmu Populer Kelompok Gramedia 2020), hlm. 10.

⁷ Masmi "implementasi peraturan bupati gayo lues no.10 tahun 2019 tentang pedoman pemberian bantuan kesejahteraan janda miskin dalam Kabupaten Gayo Lues" Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum (UIN Ar-Raniry) Banda Aceh, tanggal 06 januari 2022.

memperbaiki infrastruktur daerah seperti jalan, listrik, dan air bersih untuk membantu masyarakat lebih mudah mendapatkan pekerjaan dan meningkatkan kualitas hidup mereka.⁸

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya ekonomi seperti pendapatan, pekerjaan yang layak, pangan, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan juga dapat diukur dari pilihan gaya hidup, seperti tinggal di lokasi yang tidak sesuai, terbatasnya akses terhadap air bersih, dan terbatasnya akses terhadap layanan publik.

Kabupaten Gayo Lues masih tercatat sebagai Provinsi termiskin ke dua dari 23 Kabupaten/kota di Aceh. Adapun kabupaten/kota tertinggi hingga terendah. Persentase kemiskinan di Aceh adalah Aceh Singkil, Gayo Lues, Pidie, Pidie Jaya, Bener Meriah, Simeulue, Aceh Barat, Nagan Raya, Subulussalam, Aceh Utara, Aceh Barat Daya, Aceh Tengah, Sabang, Aceh Timur, Aceh Besar, Aceh Tenggara, Aceh Tamiang, Bireuen, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Lhokseumawe, Langsa, dan Banda Aceh.⁹

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Persentase penduduk miskin di Kecamatan Pantan Cuaca menurun dari tahun 2021 ke tahun 2022 dan kemudian ke tahun 2023. Pada tahun 2021, persentase penduduk miskin mencapai 23,1%, kemudian turun menjadi 22,3% pada tahun 2022, dan terus menurun menjadi

⁸ Keyword: poverty, Women, Multiple Classification Analysis, "laporan pengukuran kemiskinan aceh tahun 2021", Badan perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Aceh 2021.Hlm 3,4,5.

⁹ Dialeksis tajam dan strategis, "Ini 10 Kabupaten/Kota Termiskin Di Aceh, Aceh Singkil Nomor 1, 11 April 2023.

21,4% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah dan masyarakat setempat dalam meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi kemiskinan telah berdampak positif.¹⁰

Berikut adalah persentase angka kemiskinan pada tahun 2021,2022,2023 di Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gayo Lues 2024

Hal ini menarik untuk di lihat dalam konteks angka kemiskinan yang ada di Gayo Lues khususnya penelitian di Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues. Meskipun angka kemiskinan di wilayah ini mengalami penurunan dari tahun 2021,2022, hingga 2023, namun masih banyak tantangan yang dihadapi dalam mengatasi kemiskinan di sana.¹¹

Dalam hal ini terdapat beberapa Kecamatan termiskin di Gayo Lues. Berikut adalah urutan kecamatan termiskin di Kabupaten Gayo Lues, dengan

¹⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Gayo Lues.

¹¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Gayo Lues 2024

Kecamatan Pining sebagai salah satu kecamatan termiskin dan kecamatan Pantan Cuaca termasuk kecamatan termiskin ke 4 dari 11 Kecamatan. Dan beberapa Kecamatan tersebut sebagai berikut: Kecamatan Pining, Kecamatan Blang Jerango, Kecamatan Terangun, Kecamatan Pantan Cuaca, Kecamatan Putri Betung, Kecamatan Kuta Panjang, Kecamatan Blangkejeren, Kecamatan Rikit Gaib, Kecamatan Dabun Gelang, Kecamatan Blang Pegayon, Kecamatan Tripe Jaya¹²

Untuk mengatasi masalah kemiskinan, program pemerintah daerah harus lebih tepat sasaran dan tidak memandang kedekatan atau faktor hubungan keluarga. Prioritas utama dalam program tersebut adalah peningkatan sanitasi rumah tangga, peningkatan pengeluaran perbulan, dan penanganan rumah tidak layak huni. Selain itu, program-program pembangunan infrastruktur seperti jalan juga harus diperhatikan agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Meskipun sudah ada upaya dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, namun masih diperlukan upaya yang lebih maksimal untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan di Kecamatan Pantan Cuaca. Program-program ini harus memperhatikan kebutuhan masyarakat secara mendalam dan dilaksanakan dengan efektif agar dapat memberikan dampak yang signifikan dalam mengatasi kemiskinan di daerah ini.¹³

Dalam konteks Kecamatan Pantan Cuaca, faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka kemiskinan di daerah tersebut dari tahun ke tahun

¹² Badan Pusat Statistik Kabupaten Gayo Lues 2024.

¹³ BAPPEDA, *Bidang Ekonomi*, Kota Bamda Aceh, 2022

berdasarkan data adalah minimnya sanitasi rumah, seperti tidak adanya WC dan ketersediaan air untuk mandi dan mencuci.

Selain itu, kurangnya kejujuran dalam pengakuan pengeluaran masyarakat saat survei juga menjadi faktor penting. Meskipun data pengangguran menunjukkan bahwa Pantan Cuaca memiliki tingkat pengangguran yang sangat tinggi, dan pengeluaran per bulan masih di bawah garis kemiskinan. Ketika warga mengaku pengeluarannya di bawah Rp 425 ribu perbulan, maka mereka sudah tercatat sebagai orang miskin. Padahal berdasarkan data pengangguran, Kecamatan Pantan Cuaca nomor urut 6 terkecil di Kabupaten Gayo Lues, meskipun pekerjaan warga adalah bertani, berkebun ataupun pekerja bayaran di kebun.

Untuk mengatasi kemiskinan di Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues, penting bagi pemerintah daerah untuk memiliki program yang tepat sasaran dan tidak diskriminatif. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan bantuan langsung kepada yang membutuhkan tanpa memandang kedekatan atau hubungan pribadi. Selain itu, prioritas perbaikan sanitasi rumah yang tidak layak huni dan peningkatan perekonomian masyarakat juga harus menjadi fokus.

Program pembangunan infrastruktur seperti pembukaan jalan juga perlu diperhatikan agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Namun, program ini harus dijalankan dengan baik agar tidak hanya menjadi pemborosan sumber daya tanpa memberikan dampak yang signifikan pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengoptimalkan program-program ini serta meningkatkan kualitas data yang akurat, diharapkan Pantan

Cuaca dapat keluar dari daerah termiskin dan meningkatkan kesejahteraan penduduknya.

Salah satu alasan meskipun kemiskinan meningkat di Pantan Cuaca mungkin terkait dengan kurangnya pemanfaatan sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut. Meskipun ada potensi sumber daya alam, namun jika tidak dikelola atau dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat, hal ini dapat menyebabkan penurunan pendapatan dan kesejahteraan. Selain itu, masalah seperti fluktuasi harga hasil pertanian atau pasar yang tidak stabil juga dapat berkontribusi pada kesulitan ekonomi di Pantan Cuaca.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis akan meneliti dan menuangkan masalah peran pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan sehingga peneliti tertarik membuat penelitian yang berjudul **“Peran Pemerintah Dalam Mengurangi Angka Kemiskinan di Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues”**

1.2 Fokus Kajian

Agar penelitian ini lebih terarah terfokus dan tidak meluas, penelitian ini dibatasi hanya kepada Peran pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan di Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues Dan terfokus pada sejauh mana efektivitas upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu kajian ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pencapaian target pengurangan kemiskinan dan menawarkan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan pemerintah di masa yang akan datang.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan di Kecamatan Pantan Cucaca Kabupaten Gayo Lues?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini ialah mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang peran pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan di Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan upaya pemerintah.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Berikut manfaat yang diinginkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Pengembangan Teori

Penelitian ini dapat membantu dalam mengembangkan teori tentang peran pemerintah dalam mengurangi kemiskinan. Hasilnya dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam penelitian lanjutan dan pengembangan teori yang lebih luas.

2. Pengembangan Metode

Penelitian ini dapat membantu dalam mengembangkan metode yang lebih efektif untuk mengurangi kemiskinan. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam pengembangan metode yang lebih baik untuk mengurangi kemiskinan.

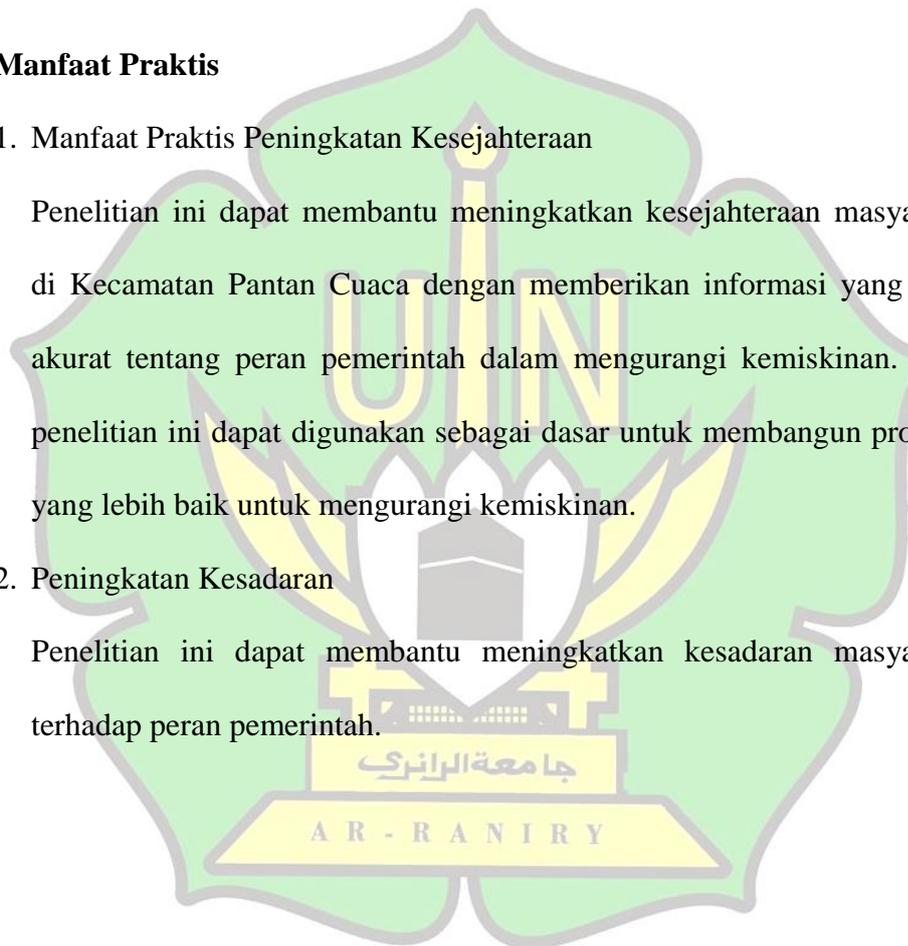
1.5.2 Manfaat Praktis

1. Manfaat Praktis Peningkatan Kesejahteraan

Penelitian ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Pantan Cuaca dengan memberikan informasi yang lebih akurat tentang peran pemerintah dalam mengurangi kemiskinan. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk membangun program yang lebih baik untuk mengurangi kemiskinan.

2. Peningkatan Kesadaran

Penelitian ini dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peran pemerintah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Penelitian ini membahas tentang peran pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan, sebenarnya telah ada diteliti baik itu dalam bentuk buku, majalah, artikel, jurnal, skripsi dan lain sebagainya. Namun sejauh ini kajian khusus tentang *Peran Pemerintah Dalam Mengurangi Angka Kemiskinan di Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues* yang belum penulis temukan di dalam buku, majalah, artikel, jurnal dan skripsi. Oleh karena itu, penulis termotivasi dan memunculkan ide untuk membahas pembahasan tersebut dalam bentuk proposal skripsi.

Peneliti akan mencantumkan beberapa penelitian yang relevan dengan peran pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan, dan nantinya akan menjadi referensi penulis dalam penelitian. Berikut ini ada beberapa kajian yang telah di teliti sebelumnya tentang peran pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan. Dalam penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan topik ini, hasil dan teori dari penelitian-penelitian ini. Selain itu penelitian terdahulu juga dimanfaatkan sebagai bahan perbandingan. Berikut ini adalah beberapa penelitian yang terkait.

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Fakhri Arshad dalam jurnal tahun 2022 yang berjudul “Peran Pemerintah Desa dalam Pengentasan

Kemiskinan di Desa Bunturia Jaya Kecamatan Duhyadah” karya mahasiswa Universitas Gorontalo menyimpulkan: Mengentaskan kemiskinan desa dengan terus memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat melalui sosialisasi solusi pengentasan kemiskinan, menyatukan kelompok masyarakat, dan memperkuat masyarakat melalui program pemberdayaan. Namun angka kemiskinan di Desa Bunturia Jaya masih tergolong tinggi dan banyak masyarakat yang menganggur sehingga peran pemerintah desa dalam menurunkan angka kemiskinan desa kurang dimanfaatkan.

Berdasarkan temuan penelitian ini, faktor-faktor penyebab kemiskinan di desa Bunturia Jaya adalah: (1). Sarana dan prasarana pendukung yang memungkinkan masyarakat memperoleh pendapatan terbatas (2). Kurangnya sumber daya alam yang dikelola masyarakat dan rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap teknologi. (3). Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan pendidikan tinggi untuk memanfaatkan potensi desa secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan keluarga; dan (4). Kelembagaan dan organisasi desa belum optimal dalam mengelola potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia desa serta pengorganisasian masyarakat untuk menjadi sumber pendapatan daerah guna menyelesaikan masalah kemiskinan desa.¹⁴

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Putri Amalia Harefa pada tahun 2022 jurnal ini dari mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Padang Sidempuan dengan berjudul: Peran Pemerintah Dalam Mengurangi Kemiskinan.

¹⁴ Arsjad, M. F., Hunawa, R., Nuna, M., & Walahe, D. (2022). Peranan Pemerintah Desa dalam Penanggulangan Kemiskinan di Desa Buntulia Jaya Kecamatan Duhiyadaa. *Economics and Digital Business Review*, 3(2), 379-396.

Berdasarkan hal tersebut, kita dapat simpulkan sebagai berikut. Program pengentasan kemiskinan bagi nelayan di Kota Medan Indah dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah setempat. Program bantuan yang disalurkan kepada masyarakat antara lain bantuan pangan seperti bantuan sosial (Bansos), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

Selain itu, di bidang kesehatan kami memberikan dukungan kesehatan berupa Program Keluarga Harapan (PKH), dukungan pendidikan melalui Pendidikan PKH, dukungan perumahan melalui Program Renovasi Rumah Jasa Parkim, dukungan pengembangan keterampilan melalui pemberian pelatihan menjahit, dan dukungan masyarakat.¹⁵ Ketiga mesin jahit tersebut akan memberikan dukungan modal ekonomi aktif kepada UMKM dan membantu menjaga rasa aman melalui keselamatan dan ketertiban sehingga masyarakat merasa aman. Namun, pemerintah menghadapi beberapa kendala dalam pengentasan kemiskinan di Nerayan Indah, antara lain pendataan dan tujuan program yang tidak akurat, kurangnya partisipasi aktif masyarakat, dan penggunaan bantuan yang konsumtif.

Penelitian ketiga yang dilakukan Sitti Hajra dalam skripsi tahun 2022 yang berjudul “Penanggulangan Kemiskinan: Antara Pemerintah dan Masyarakat di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare (Perspektif Ekonomi Islam). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Penanggulangan Kemiskinan: antara Pemerintah dan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan

¹⁵ Harefa, P. A. (2022). Peran Pemerintah dalam Mengurangi Kemiskinan. *Jurnal El-Thawalib*, 3(2), 363-374.

Bacukiki Kota Parepare (Perpektif Ekonomi Islam), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Bentuk penanggulangan kemiskinan antara pemerintah dan masyarakat meliputi perbaikan rumah, pemberian modal usaha, peralatan menjahit, alat pertukangan, alat memasak, dan alat salon/tata rias. Ada dua faktor yang mempengaruhi penanggulangan kemiskinan, yaitu faktor internal yang berasal dari dalam pemerintahan melalui pelatihan-pelatihan sebelum memberikan bantuan, serta faktor eksternal yang dilakukan oleh masyarakat melalui Yayasan LPK Buana Mandiri untuk pelatihan menjahit dan tata rias.

Implementasi peran pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi kemiskinan di Kelurahan Lompo'e telah berjalan dengan baik. Pemerintah memberikan beberapa bantuan, yang kemudian dimanfaatkan masyarakat untuk mendapatkan penghasilan. Namun, beberapa masyarakat tidak mendapatkan bantuan yang sesuai dengan keahlian mereka, sehingga bantuan tersebut dijual. Dalam ekonomi Islam, pengentasan kemiskinan menurut Yusuf Qardhawi didasarkan pada instrumen bekerja, pemberian zakat, dan jaminan negara dari beberapa sumber.¹⁶

Naimun, perbedaannya terletak pada lokasi penelitian waiktu, dain metode penelitian yang digunakan Ketiga penelitian tentang pengentasan kemiskinan di Aceh menunjukkan kesamaan dalam menekankan peran pemerintah dan masyarakat, serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kemiskinan seperti rendahnya pendidikan dan partisipasi masyarakat. Faikhri Airshaid dan Putri

¹⁶ Siti Hajra (2022) *Penanggulangan Kemiskinan: Antar Pemerintah dan Masyarakat di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare (Perspektif Ekonomi Islam)*

Aimailiai Hairefai fokus pada program pemerintah yang berpotensi mengurangi kemiskinan, sedangkan Sitti Haijrai menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Meskipun pendekatan dan konteks penelitian berbeda, semua merekomendasikan solusi untuk meningkatkan kualitas hidup, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Namun, belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji peran pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan di Kecamatan Pantan Cuaca, Kabupaten Gayo Lues, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memahami tantangan dan solusi yang relevan di wilayah tersebut.

2.2 Landasan Teoritis

Teori adalah suatu konsep, definisi, dan pernyataan yang memberikan pandangan sistematis terhadap suatu fenomena dengan menjelaskan hubungan antar variabel untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena tersebut. Dalam pendekatan penelitian kualitatif, dimana proses penelitian diawali dengan observasi dan gejala, fungsi teori adalah membuat generalisasi abstrak melalui proses induksi.

Dalam penelitian kualitatif, teori tidak membatasi peneliti, melainkan teori berfungsi sebagai analisis dan membantu peneliti memahami data dan berinteraksi dengan konteks sosial di mana data tersebut terjadi. Dalam penelitian ini, tujuan teori adalah untuk membantu penulis menjelaskan secara ilmiah data yang telah mereka kumpulkan dan menghasilkan interpretasi yang dapat dianggap benar oleh orang lain.

2.2.1. Teori Peranan Pemerintah

Dalam bahasa Inggris, peranan (*role*) dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Secara umum pengertian peranan adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan, sedangkan Margono Slamet, yang mendefinisikan peranan sebagai suatu perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu posisi dalam masyarakat. Peranan (*role*) merupakan proses dinamis kedudukan status. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu dengan yang lain saling tergantung, artinya tidak ada peran tanpa status dan tidak ada status tanpa peran. Suatu peran paling sedikit mencakup tiga hal yaitu

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep ikhwal apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat.
3. Peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹⁷

Peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah memberi arah pada proses sosialisasi, pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan, dapat mempersatukan

¹⁷ Soekanto, S. (2006). *Teori Peran Dalam Ilmu Hubungan Internasional*.

kelompok atau masyarakat dan menghidupkan sistem pengendali dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.¹⁸

Berdasarkan pelaksanaannya peranan-peranan sosial dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Peranan yang diharapkan (*expected roles*)

Cara ideal dalam pelaksanaan-peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peranan yang diharapkan dilaksanakan secermat-cermatnya dan peranan ini tidak dapat ditawar dan harus dilaksanakan seperti yang ditentukan. Peranan jenis ini antara lain peranan hakim, peranan protokoler diplomatik, dan sebagainya.

2. Peranan yang disesuaikan (*actual roles*)

Peranan yang disesuaikan (*actual roles*), yaitu cara bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luwes, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Peran yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu, peranan yang disesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kurangan yang muncul dapat di anggap wajar oleh masyarakat.¹⁹

Menurut teori peran dalam kajiannya terhadap hubungan antar manusia ini, sebenarnya dalam pergaulan sosial itu sudah ada skenario atau peran-peran yang telah disusun oleh masyarakat, yang mengatur apa dan bagaimana peran setiap orang dalam pergaulannya. Kemudian sama halnya dengan kehidupan

¹⁸ <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-peranan-definisi-menurut.html>

¹⁹ J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan* (Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 68-70.

perpolitikan antar negara atau dalam dunia internasional, dapat kita lihat dari teori peran yang didasarkan pada analisis politik.

Pemikiran John Wahlke, tentang teori peran memiliki dua kemampuan yang berguna bagi analisis politik. Ia membedakan peran berdasarkan pada aktor yang memainkan peranan tersebut, yaitu peran yang dimainkan oleh aktor politik dan peran oleh suatu badan atau institusi. Ia menunjukkan bahwa aktor politik umumnya berusaha menyesuaikan tindakannya dengan norma-norma perilaku yang berlaku dalam peran yang dijalankannya.²⁰

Sedangkan ia mendeskripsikan peranan institusi secara behavioral, dimana model teori peran menunjukkan segi-segi perilaku yang membuat suatu kegiatan sebagai institusi. Kerangka berpikir teori peran juga memandang individu sebagai seorang yang bergantung dan bereaksi terhadap perilaku orang lain.

2.2.2. Pemerintah

Selanjutnya mengenai istilah *Government* (Pemerintah), secara epistemology berasal dari kata “*governor*” yang diambil dari bahasa Yunani dengan padanan kata atau *steering-steersman* yang mengarahkan, sehingga secara umum pemerintah adalah merupakan istilah yang dipakai untuk menuju lembaga yang mengarahkan kehidupan masyarakat.

Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa *government* berasal dari bahasa Perancis “*goupernance*” (*royal officer*) yang istilah ini muncul pada abad

²⁰ Henrichard Jordy Sunkudon, Perana United High Commissioner For Refugees (Unhcr) Dalam Menangani Pengungsi Etnis Rohingya Di Indonesia, jurna jurusan ilmu pemerintah, volume 1 no. 1 tahun 2018

14 untuk menyebut aparat yang loyal, sehingga pemerintah juga bisa dimaknai aparat yang menjalankan tugas secara loyal. Secara lebih konseptual, Pemerintah adalah lembaga yang dibentuk untuk mewujudkan cita-cita masyarakat suatu bangsa, membuat dan melaksanakan keputusan untuk mencapai cita-cita itu.

Pemerintah mendapatkan mandat yang otoritatif untuk mendayagunakan sumber-sumber daya yang ada pada masyarakat untuk melaksanakan tugas itu. Pemerintah dapat melakukan eksplorasi pertambangan atau meminta pihak lain melakukan eksplorasi itu, menetapkan tarif, membuat peraturan, melarang orang untuk melakukan sesuatu, dan sebagainya demi kehidupan social yang diidamkan.

Oleh karenanya perbedaan yang jelas pemerintah dan lembaga lain adalah dalam konteks interalasi sosial, pemerintah memiliki legitimasi kekuasaan yang bersifat memaksa, yang disebut Huges sebagai “the power of coercion”, sedangkan lembaga lain pola interalasi yang terjadi bersifat sukarela (voluntary). “kekuasaan yang memaksa” itu timbul karena adanya legitimasi undang-undang yang dimiliki pemerintah untuk bertindak atas nama Negara dalam konteks menjaga dan menjamin kepentingan sosial dalam proses pencapaian tujuan.²¹

²¹ Murni Puady, *Teori-teori Dalam Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Kencana,2011), hlm,301-302

2.23 Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah daerah adalah kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, seperti provinsi, kabupaten/kota, atau desa. Kebijakan ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²² Langkah-langkah kebijakan penanggulangan kemiskinan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kebijakan pengentasan kemiskinan di tingkat pusat terdiri dari tiga program utama, yaitu:

1. Bidang Kesehatan

Program ini bernama Indonesia Sehat, diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Media yang digunakan adalah Kartu Indonesia Sehat (KIS), dengan cakupan hingga tingkat desa (POSYANDU). Penerima manfaat adalah masyarakat kurang mampu yang sudah memiliki BPJS PBI, serta kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan bayi baru lahir.²³

2. Bidang Pendidikan

Program ini bernama Indonesia Pintar, menggunakan media Kartu Indonesia Pintar (KIP). Penerima manfaat adalah semua anak SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK dari keluarga pemegang KKS/KPS, PKH, panti asuhan, dan anak yatim piatu. Masyarakat kurang mampu yang sudah memiliki BPJS PBI, kelompok PMKS, serta bayi baru lahir juga termasuk

²² kaswadi yudha pamungkas s.ip, m.si widyaiswara, "analisis kebijakan pemerintah daerah pengetahuan wajib bagi para pemimpin daerah" bpsdm provinsi sulawesi selatan, 27 feb 2023

²³ Wulanadary, A., Sudarman, S., & Ikhsan, I. (2019). Inovasi Bpjs Kesehatan Dalam Pemberian Layanan Kepada Masyarakat: Aplikasi Mobile Jkn. *Jurnal Public Policy*, 5(2), 98-107.

penerima. Bantuan disalurkan dalam bentuk tabungan yang bisa dicairkan atau disimpan di Kantor POS atau bank yang ditunjuk.²⁴

3. Bidang Sosial Ekonomi

Program ini bernama Kesejahteraan Sosial, menggunakan media Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS). Penerima manfaat adalah keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia, termasuk penghuni panti asuhan, panti jompo, dan panti sosial lainnya. Besaran bantuan adalah Rp200.000 per keluarga per bulan, disalurkan dalam bentuk simpanan atau tabungan yang bisa dicairkan atau tetap disimpan di Kantor POS atau bank yang ditunjuk.

2.3 Konsep Kemiskinan

Konsep kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau kelompok masyarakat tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya ekonomi, sosial, dan budaya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan. Kemiskinan juga dapat mencakup kurangnya akses terhadap pekerjaan yang layak, penghasilan yang stabil, serta keamanan ekonomi yang memadai untuk mengatasi risiko dan ketidakpastian.

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan kemiskinan meliputi rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya lapangan kerja yang layak, akses terbatas terhadap layanan kesehatan, ketimpangan dalam distribusi kekayaan, serta konflik sosial dan politik. Kemiskinan juga dapat diwariskan dari generasi ke

²⁴ Rohaeni, N. E., & Saryono, O. (2018). Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Upaya Pemerataan Pendidikan. *Indonesian Journal of Education Management & Administration Review*, 2(1), 193-204.

generasi jika tidak ada intervensi yang tepat untuk memutus mata rantai kemiskinan.

Penanggulangan kemiskinan memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk kebijakan ekonomi yang inklusif, penguatan infrastruktur sosial dan ekonomi, akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta pembangunan kapasitas masyarakat untuk mandiri. Upaya ini juga harus didukung oleh partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan masyarakat itu sendiri.

Dengan memahami konsep kemiskinan ini, diharapkan dapat dikembangkan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi masalah kemiskinan, sehingga masyarakat dapat mencapai taraf hidup yang lebih baik dan lebih layak.

2.4 Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi adalah faktor produksi yang merupakan kekuatan utama dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Naik turunnya laju pertumbuhan ekonomi merupakan konsekuensi dari perubahan yang terjadi di dalam faktor produksi. Adapun faktor ekonomi yaitu sebagai berikut:²⁵

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan dapat memberikan kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan. Pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan sektor produksi primer dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

²⁵ Sutawijaya, A. (2012). Pengaruh faktor-faktor ekonomi terhadap inflasi di Indonesia. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, 8(2), 85-101.

2. Upah Minimum Negara Bagian

Upah minimum negara bagian yang tinggi meningkatkan pendapatan masyarakat dan membantu mengurangi kemiskinan. Pemerintah dapat menaikkan upah minimum negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Tingkat Pengangguran

Pengangguran yang tinggi dapat meningkatkan kemiskinan. Pemerintah dapat meningkatkan pelatihan tenaga kerja dan mengembangkan keterampilan untuk mengurangi pengangguran.

4. Pengelolaan Dana Kemiskinan

Pengelolaan dana kemiskinan yang efektif membantu pengentasan kemiskinan. Pemerintah dapat meningkatkan pengelolaan dana kemiskinan dengan menggunakan sistem yang terintegrasi hingga ke desa-desa.

2.5 Faktor Sosial

Faktor sosial merupakan sekelompok orang yang secara bersama-sama mempertimbangkan secara dekat persamaan di dalam status atau penghargaan komunitas yang secara formal dan informal. Faktor sosial dapat dilihat dari hubungan dengan teman, keluarga dan orang tua dalam mempengaruhi keputusan pembelian. Adapun faktor sosial yaitu sebagai berikut:

1. Penguatan Komunitas

Penguatan Komunitas membantu mengurangi kemiskinan. Pemerintah dapat memperkuat pemberdayaan masyarakat dengan memberikan akses pembangunan yang lebih luas.

2. Keterampilan

Keterampilan yang rendah dapat meningkatkan kemiskinan. Pemerintah dapat meningkatkan keterampilan masyarakat dengan melatih pekerja.

3. Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan dapat meningkatkan kemiskinan. Pemerintah dapat meningkatkan pendidikan dengan meningkatkan akses terhadap pendidikan berkualitas.

4. Kesehatan

Kesehatan yang buruk dapat meningkatkan kemiskinan. Pemerintah dapat meningkatkan kesehatan dengan meningkatkan akses terhadap fasilitas kesehatan yang berkualitas.

2.6 Faktor Politik

Faktor politik mengacu pada berbagai elemen dalam lingkungan politik yang memengaruhi operasi dan keputusan sebuah organisasi atau individu. Faktor-faktor ini meliputi kebijakan pemerintah, regulasi, stabilitas politik, kebijakan perpajakan, undang-undang perdagangan, dan hubungan internasional. Faktor politik dapat berdampak signifikan pada aktivitas ekonomi, sosial, dan lingkungan, dan sering kali menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan bisnis dan kebijakan publik. Adapun faktor politik yaitu:

1. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah yang tidak adil dapat meningkatkan kemiskinan. Pemerintah harus mengambil tindakan yang adil dan tidak memihak untuk mengurangi kemiskinan.

2. Pengawasan dan Peraturan

Pengawasan dan peraturan yang efektif membantu mengurangi kemiskinan.

Untuk mengurangi kemiskinan, pemerintah harus memiliki pengawasan dan regulasi yang efektif.

3. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi aktif masyarakat membantu mengurangi kemiskinan. Pemerintah perlu meningkatkan partisipasi masyarakat dengan memberikan akses pembangunan yang lebih luas.

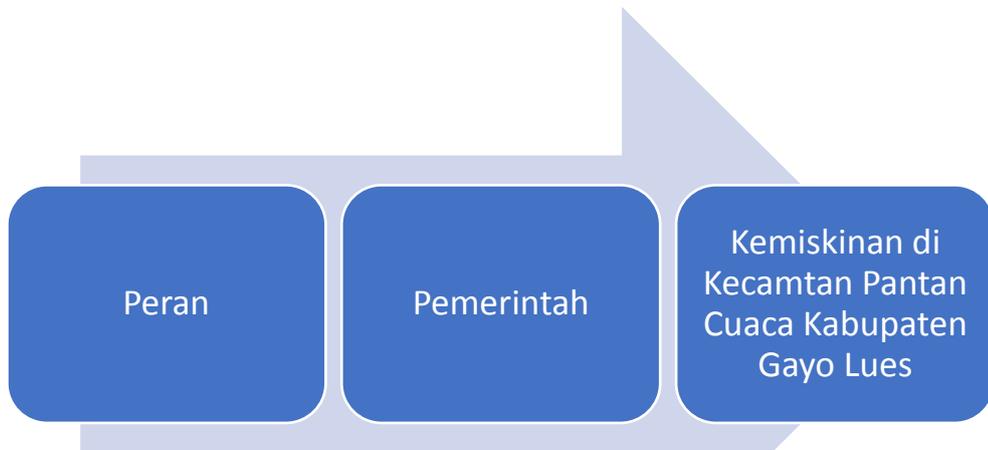
4. Sistem Pengelolaan Data Kemiskinan

Sistem pengelolaan data kemiskinan yang efektif dapat memberikan kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan. Pemerintah harus memiliki sistem pengelolaan data kemiskinan yang terintegrasi hingga ke desa.²⁶

2.7 Kerangka Berpikir

Berikut ini peneliti menyajikan kerangka pemikiran yang dapat mewakili dari isi penelitian ini secara umum dapat dilihat pada gambar berikut ini, yang menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan di Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues.

²⁶ Nugroho, S. B. M. (2008). Evaluasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi investasi di Indonesia dan implikasi kebijakannya. *Riptek*, 2(1), 18-21.



BAB III

METODE PENELITIAN

Pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, langkah-langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan dan persepsi. Sedangkan pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu peneliti memberikan pemahaman secara mendalam dan mendetail tentang obyek yang akan di teliti serta memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah yang berkaitan dengan penelitian.

Fokus penelitian ini memiliki peran penting dalam menentukan batasan dan ruang lingkup penelitian. Selain itu, fokus juga berfungsi sebagai panduan untuk mengarahkan jalannya penelitian Fokus penelitian ini adalah bagaimana Peran Pemerintah dalam Mengurangi Angka Kemiskinan di Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues.

3.2 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan lokasi penelitian wilayah Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues. Penelitian dilakukan di Kantor Dinas sosial, dengan Kepala Bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir

miskin yang beralamat di kampung Sentang Kecamatan Blang Kejeran, Kabupaten Gayo Luea. Alasan Peneliti melakukan penelitian di kantor tersebut karena Dinas Sosial Bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin Kabupaten Gayo Lues memiliki tugas dan kewenangan dalam mengatasi kemiskinan di Kematan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues.

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai instrumen utama dan sangat diperlukan, yaitu peneliti bertindak sebagai pengumpul data dan sebagai instrument aktif dalam upaya mengumpulkan data sebagai bahan analisis. Kehadiran peneliti bersifat mutlak, karena harus melakukan wawancara secara mendalam guna mendapatkan data yang validitas dan obyektif terkait Peran Pemerintah dalam Mengurangi Angka Kemiskinan di Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues.

3.3 Sumber Data

Data adalah bahan keterangan tentang suatu objek penelitian yang diperoleh dari lokasi penelitian. Definisi data sebenarnya mirip dengan definisi informasi, hanya saja informasi lebih ditonjolkan dari segi pelayanan, sedangkan data lebih menonjolkan aspek mater.

3.3.1 Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Dalam hal ini data yang akan diperoleh melalui observasi dan juga dari hasil wawancara langsung dengan pegawai Dinas

Sosial, bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin serta masyarakat Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues.

3.3.2 Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data sekunder yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan data BPS dari tahun 2021-2024. Adapun data sekunder yang diperoleh berupa daftar kepegawaian kantor Dinas Sosial, data warga yang memperoleh bantuan sosial, serta data dan informasi terkait program-program penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan pemerintah. yang diperlukan dalam penelitian ini.

3.4 Informan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat orang yang menjadi sumber data untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penelitian, sehingga dapat memberikan informasi sesuai dengan fakta yang berhubungan dengan data yang dibutuhkan. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian sebanyak 10 orang sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1 Informan

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin	1 orang
2	Kepala Desa (Seneren)	1 orang
3	Kepala Desa (Kuning Kurnia)	1 orang
4	Kepala Desa (Cane Baru)	1 orang
5	Masyarakat	6 orang
Total		10 orang

Sumber: Data di Olah Tahun 2024

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang Peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.5.1 Obsevasi

Penulis melakukan observasi untuk memperoleh data dalam bentuk mengamati serta mengadakan pencatatan dari hasil observasi. Teknik observasi yang penulis lakukan adalah langsung mendatangi tempat tersebut. Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang nampak pada objek penelian. Dalam pencatatan dan pengamatan yang dilakukan terhadap objek ditempat kejadian atau berlangsungnya peristiwa, sedangkan observasi tidak langsung adalah pengamatan. yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang akan diselidiki. Dalam penelitian ini peneliti akan mengobservasi tentang Peran Pemerintah dalam Mengurangi Angka Kemiskinan Kecamatan Pantan Cuaca, Kabupeten Gayo Lues.

3.5.2 Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung dengan informan atau responden sesuai dengan informasi dan jenis data yang di butuhkan dalam penelitian. Wawancara merupakan suatu percakapan antara dua orang atau lebih untuk bertukar informasi mengenai suatu masalah tertentu bertukar ide melalui tanya jawab. sehingga Peneliti mendapatkan makna dalam topik. Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, adapun alasan peneliti mewawancarai pegawai Dinas

Sosial karena informasi yang didapatkan dari narasumber tersebut berguna dalam tahap analisis data dengan metode triangulasi data yang peneliti lakukan.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambaran, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah, kehidupan, peraturan, kebijakan. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan beberapa dokumen berupa jumlah pegawai kantor, peta wilayah kerja Dinas Sosial, serta data warga kemiskinan yang diperoleh dari kecamatan.

3.6 Teknik Analisa Data

Setelah data-data relevan diperoleh melalui proses tersebut di atas, maka tahapan selanjutnya adalah akan diolah menjadi data yang terstruktur dan sistematis, agar nantinya dapat mempermudah ketika dilakukan analisis. Adapun tahapan-tahapan dalam pengolahan data, yaitu:

3.6.1 Pemeriksaan Ulang

Dalam tahap ini, semua data yang telah diperoleh akan diperiksa ulang dengan cermat. Proses pengeditan ini memperhatikan aspek kesesuaian, kelengkapan, dan kejelasan data yang telah dikumpulkan. Proses pemeriksaan ulang untuk memastikan keakuratan dan kecocokan data. Karena tidak semua data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan penelitian, peneliti hanya akan menggunakan informasi yang sesuai dengan rumusan masalah.

3.6.2 Klasifikasi Data

Setelah pemeriksaan ulang dilakukan, peneliti akan mengklasifikasikan data-data yang telah terkumpul sesuai dengan rumusan masalah. Langkah ini bertujuan untuk mengelompokkan data-data yang relevan dengan Peran Pemerintah Dalam Mengurangi Angka Kemiskinan di Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues. Hal ini dilakukan agar data yang digunakan dalam penelitian benar-benar memuat permasalahan yang ingin diteliti.

3.6.3 Pembuktian

Tahap pembuktian dilakukan dengan memeriksa kembali data wawancara yang telah diperoleh. Hal ini bertujuan untuk memastikan validitas data. Peneliti akan menemui kembali sumber data untuk memverifikasi hasil wawancara yang telah dilakukan. Dengan melakukan pembuktian ini, diharapkan data yang digunakan dalam penelitian memiliki tingkat validitas yang tinggi.

3.6.4 Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan mengurutkan data sesuai dengan permasalahan yang diteliti, mengoperasikan data dalam bentuk informasi, kategori tertentu sesuai dengan penelitian, memilah-milahnya menjadi sesuatu yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Setelah data terverifikasi, peneliti akan melakukan analisis data. Proses ini melibatkan pengolahan data secara lebih mendalam untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Analisis ini bertujuan untuk menghasilkan kesimpulan atau hasil akhir dari penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian



Gambar 4.1 Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues
Sumber: Diolah Penelitian Tahun 2024

Kecamatan Pantan Cuaca terletak di Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh, Indonesia. Kabupaten Gayo Lues terkenal dengan keindahan alamnya yang masih alami dan budaya lokal yang kuat, serta merupakan salah satu daerah yang mayoritas penduduknya merupakan etnis Gayo. Kecamatan Pantan Cuaca, sebagai bagian dari kabupaten ini, memiliki letak geografis yang strategis dengan berbagai potensi alam yang mendukung kehidupan masyarakat setempat.

Secara geografis, Kecamatan Pantan Cuaca terletak di bagian tengah Kabupaten Gayo Lues. Berikut adalah batas-batas wilayah Kecamatan Pantan Cuaca:

- a. Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Kutapanjang
- b. Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Blangkejeren
- c. Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Terangun
- d. Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Rikit Gaib

Dengan batas-batas tersebut, Kecamatan Pantan Cuaca memiliki posisi yang cukup strategis di tengah Kabupaten Gayo Lues, yang memungkinkan akses mudah ke kecamatan-kecamatan lainnya di sekitarnya. Kecamatan Pantan Cuaca memiliki topografi yang bervariasi mulai dari dataran rendah hingga perbukitan. Daerah ini dikenal dengan kondisi alamnya yang hijau dan subur, dengan hutan-hutan yang masih terjaga dengan baik. Ketinggian daerah ini bervariasi dari 200 meter hingga 1.500 meter di atas permukaan laut, sehingga memberikan iklim yang sejuk dan nyaman.

Iklim di Kecamatan Pantan Cuaca dipengaruhi oleh ketinggian wilayahnya. Daerah ini memiliki iklim tropis dengan curah hujan yang cukup tinggi sepanjang tahun. Musim hujan biasanya terjadi antara bulan Oktober hingga April, sedangkan musim kemarau berlangsung dari Mei hingga September. Suhu udara rata-rata berkisar antara 18°C hingga 28°C, yang membuat daerah ini cocok untuk pertanian dan perkebunan.

Akses menuju Kecamatan Pantan Cuaca dapat dicapai melalui jalan darat yang menghubungkan dengan ibu kota Kabupaten Gayo Lues, yaitu Blangkejeren. Jalan-jalan utama yang menghubungkan kecamatan ini cukup baik, meskipun beberapa ruas jalan memerlukan perbaikan dan pemeliharaan rutin untuk memastikan kelancaran transportasi. Kendaraan umum dan pribadi dapat digunakan untuk mencapai wilayah ini, yang mendukung mobilitas penduduk serta distribusi barang dan jasa.

Kecamatan Pantan Cuaca memiliki berbagai potensi alam yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Sektor pertanian

menjadi andalan dengan komoditas utama seperti kopi, padi, dan palawija. Selain itu, potensi perkebunan dan kehutanan juga memberikan kontribusi besar bagi perekonomian daerah ini. Keindahan alam yang masih alami juga membuka peluang bagi pengembangan sektor pariwisata.

Dengan letak geografis yang strategis dan kondisi alam yang mendukung, Kecamatan Pantan Cuaca memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut. Peningkatan aksesibilitas dan pemanfaatan sumber daya alam yang bijaksana diharapkan dapat membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat setempat. Pemerintah daerah dan masyarakat diharapkan dapat bekerja sama untuk memaksimalkan potensi ini demi kemajuan bersama.

4.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Pembangunan infrastruktur di Kecamatan Pantan Cuaca berfokus pada meningkatkan aksesibilitas dan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih. Proyek-proyek pembangunan jalan baru dan perbaikan jalan yang rusak dilakukan untuk memperbaiki jaringan jalan yang ada. Selain itu, penyediaan jaringan listrik yang stabil dan perluasan jaringan ke daerah terpencil dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh wilayah kecamatan memiliki akses ke listrik. Pengadaan air bersih dilakukan melalui pembangunan sumur bor dan sistem pengolahan air untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat memiliki akses ke air bersih.

Pembangunan sosial di Kecamatan Pantan Cuaca berfokus pada meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program sosial. Program pendidikan seperti penyediaan beasiswa dan pembangunan sekolah

dilakukan untuk meningkatkan akses masyarakat ke pendidikan. Layanan kesehatan melalui pembangunan puskesmas dan program imunisasi dilakukan untuk meningkatkan akses masyarakat ke layanan kesehatan. Peningkatan kesejahteraan ekonomi melalui pelatihan keterampilan dan bantuan usaha kecil dilakukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan usaha mereka. Pengembangan ekonomi di Kecamatan Pantan Cuaca berfokus pada meningkatkan potensi ekonomi daerah melalui pengembangan sektor pertanian, perkebunan, dan pariwisata.

Fungsi:

1. Pemerintahan

Melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di tingkat kecamatan, termasuk pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan aturan yang berlaku, administrasi umum termasuk pencatatan kependudukan, dan menjaga keamanan dan ketertiban melalui koordinasi dengan aparat keamanan.

2. Pembangunan

Melaksanakan program-program pembangunan di tingkat kecamatan, termasuk perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur, program pembangunan sosial seperti layanan kesehatan dan pendidikan, dan pengembangan ekonomi melalui dukungan terhadap usaha lokal dan pariwisata.

3. Pelayanan

Memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk pelayanan kesehatan melalui puskesmas dan posyandu, pelayanan pendidikan melalui sekolah dan

program beasiswa, dan pelayanan administrasi seperti KTP, KK, dan akta kelahiran.

4. Koordinasi

Koordinasi dengan pemerintah daerah dan lembaga-lembaga lain, kerjasama dengan dinas terkait untuk mencapai tujuan pembangunan, koordinasi dengan lembaga swadaya masyarakat dalam program pemberdayaan, dan sinergi dengan masyarakat dalam pelaksanaan program-program kecamatan.

Dengan tugas pokok dan fungsi ini, Kecamatan Pantan Cuaca dapat bekerja secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan daerah.

4.1.3 Visi dan Misi Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues

Visi:

Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Misi:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan.
- 2) Mengembangkan kemandirian masyarakat dengan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.
- 3) Melestarikan dan mengembangkan kebudayaan lokal.
- 4) Meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik.
- 5) Mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.

4.1.4 Susunan Organisasi Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues Struktur Organisasi Kecamatan Pantan Cuaca

Struktur organisasi Kecamatan Pantan Cuaca terdiri dari beberapa jabatan penting yang memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Berikut adalah struktur organisasi lengkap beserta penjelasan singkat mengenai tugas setiap posisi:

1) Camat

Pemimpin tertinggi di kecamatan yang bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di Kecamatan Pantan Cuaca.

2) Sekretaris Camat

Membantu Camat dalam melaksanakan tugas-tugas administrasi dan koordinasi. Ia bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi kantor, penyusunan laporan, dan memastikan kelancaran operasional sehari-hari.

3) Kepala Seksi Pemerintahan

Bertanggung jawab atas urusan pemerintahan, termasuk administrasi kependudukan, keamanan, ketertiban, dan hubungan masyarakat. Ia mengelola data kependudukan dan layanan publik terkait pemerintahan.

4) Kepala Seksi Pembangunan

Mengkoordinasikan dan melaksanakan program pembangunan fisik di kecamatan, seperti pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, dan fasilitas umum lainnya.

5) Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat

Mengelola program-program kesejahteraan sosial, pendidikan, dan kesehatan. Ia bertanggung jawab atas layanan kesehatan, bantuan sosial, serta program-program peningkatan kualitas hidup masyarakat.

6) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Berperan dalam memberdayakan masyarakat desa melalui pelatihan, pembinaan, dan pendampingan. Ia membantu desa dalam mengembangkan potensi lokal dan meningkatkan kemandirian masyarakat.

7) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Bertanggung jawab atas administrasi umum, pengelolaan kepegawaian, dan keuangan. Ia mengurus surat menyurat, arsip, serta administrasi kepegawaian seperti pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian pegawai.

Dengan struktur organisasi ini, Kecamatan Pantan Cuaca dapat berfungsi secara efektif dan efisien dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Setiap posisi memiliki peran penting yang saling mendukung untuk mencapai visi dan misi kecamatan.

4.2 Peran Pemerintah Dalam Mengurangi Angka Kemiskinan di Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues

Secara umum, kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Konsep yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan beberapa negara lain adalah pendekatan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar sehingga kemiskinan

dianggap sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran).

Peran pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan sangatlah penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kebijakan dan program yang dapat memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat yang rentan terhadap kemiskinan. Melalui anggaran yang dialokasikan untuk program-program sosial dan ekonomi, pemerintah dapat memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, seperti program bantuan sosial, subsidi pendidikan, dan pelatihan kerja.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues, dinyatakan bahwa:

“Kami telah mengambil serangkaian langkah, termasuk identifikasi dan pemetaan angka kemiskinan di Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues. Pemetaan angka kemiskinan di Kecamatan Pantan Cuaca, melibatkan analisis dan penyajian data yang menggambarkan distribusi dan tingkat kemiskinan di wilayah tersebut.”²⁷

Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kecamatan Pantan Cuaca, khususnya Dinas Sosial Kabupaten Gayo Lues, menunjukkan komitmen yang kuat dalam upaya menekan angka kemiskinan di wilayah tersebut. Langkah-langkah konkret yang diambil, seperti identifikasi dan pemetaan, mencerminkan pendekatan strategis yang bertujuan untuk memahami dan menangani masalah kemiskinan secara lebih efektif.

²⁷ Wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues. Pada Tanggal 25 Juni 2024

Untuk menganalisis Dinas Sosial Kabupaten Gayo Lues melaksanakan strategi ini, peneliti dapat menggunakan dua dimensi yang telah ditetapkan sebagai fokus penelitian, yaitu strategi dan kemiskinan. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai upaya dan tantangan yang dihadapi dalam pengentasan kemiskinan di Kecamatan Pantan Cuaca.

Pemerintah dapat menerapkan kebijakan redistribusi pendapatan melalui pajak dan transfer pembayaran, seperti subsidi langsung kepada kelompok masyarakat miskin, program bantuan sosial, atau bantuan tunai bersyarat. Kebijakan ini dirancang untuk memastikan bahwa sumber daya nasional didistribusikan secara lebih adil dan merata. Penciptaan lapangan kerja merupakan salah satu cara paling efektif untuk mengurangi kemiskinan. Pemerintah dapat mendorong investasi di sektor-sektor yang padat karya, memberikan insentif kepada perusahaan yang menciptakan lapangan kerja, serta mengembangkan program pelatihan dan pendidikan keterampilan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja.

Akses terhadap pendidikan yang berkualitas adalah kunci untuk mengurangi kemiskinan. Pemerintah berperan dalam menyediakan pendidikan dasar gratis, memperluas akses ke pendidikan menengah dan tinggi, serta meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan kurikulum dan pelatihan guru. Pendidikan yang baik memberi peluang kepada masyarakat miskin untuk keluar dari kemiskinan melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan.

Pemerintah harus memastikan bahwa layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas tersedia bagi semua lapisan masyarakat. Program kesehatan yang inklusif, seperti asuransi kesehatan nasional, imunisasi, dan perbaikan gizi, membantu mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan kesehatan masyarakat dan mengurangi beban biaya kesehatan yang dapat menjerumuskan keluarga ke dalam kemiskinan. Pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. Partisipasi masyarakat memastikan bahwa program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan lokal dan meningkatkan akuntabilitas.

Pengelolaan anggaran dan program kemiskinan harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel untuk mencegah penyalahgunaan dana dan memastikan bahwa bantuan tepat sasaran. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam mengurangi angka kemiskinan melalui berbagai kebijakan dan program yang terkoordinasi dengan baik. Upaya ini memerlukan komitmen jangka panjang, dukungan sumber daya yang memadai, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta dan masyarakat sipil. Dengan peran aktif pemerintah, diharapkan angka kemiskinan dapat terus menurun dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

4.2.1 Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Serta Modal Usaha

Usaha Ekonomi Produktif (UEP) adalah inisiatif atau kegiatan ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk menghasilkan barang atau jasa yang memiliki nilai ekonomis, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan individu atau kelompok. Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sering dikaitkan dengan

upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama di kalangan kelompok-kelompok rentan seperti keluarga miskin, wanita, dan pemuda. Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bertujuan untuk memberdayakan individu atau kelompok agar masyarakat bisa mandiri secara ekonomi, dengan cara memberikan kesempatan untuk berusaha dan menghasilkan pendapatan. Usaha Ekonomi Produktif (UEP) seringkali melibatkan pelatihan dan peningkatan kapasitas untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam mengelola modal usaha.

Modal usaha dari dana desa adalah salah satu bentuk pemanfaatan Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan ekonomi di tingkat desa. Penggunaan Dana Desa untuk modal usaha bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta kegiatan produktif lainnya yang dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Aspek penting terkait penggunaan Dana Desa sebagai modal usaha yaitu Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dana Desa dapat digunakan untuk mendirikan atau mengembangkan BUMDes, yang berfungsi sebagai lembaga ekonomi desa untuk mengelola usaha-usaha yang dimiliki oleh desa. BUMDes dapat berperan dalam mengelola berbagai kegiatan ekonomi, seperti perdagangan, pertanian, pariwisata, dan jasa keuangan mikro.²⁸

²⁸ Diskom NF, Penyerahan Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bentuk Keperdulian Pemerintah Kepada Penyandang Disabilitas, Artikel, 30 April 2024

Hal tersebut senada dengan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin (Dinas Sosial) Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues menyebutkan bahwa:

“Peran kami sebagai pemerintah dalam Mengatasi Kemiskinan: Dinas Sosial berperan aktif dalam menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Pantan Cuaca melalui program pemberdayaan sosial dan kegiatan usaha ekonomi produktif (UEP) serta modal usaha kecil-kecilan seperti kerajinan tangan, usaha kuliner, pertanian, peternakan, atau usaha jasa yang dijalankan oleh individu atau kelompok di masyarakat.”²⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa Peran pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Pantan cuaca sangat penting terutama melalui keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan program pemberdayaan sosial. Kesejahteraan sosial berfokus pada kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dengan menyediakan pembiayaan usaha kepada masyarakat kurang mampu dan meningkatkan pendapatan serta kualitas hidup mereka.

Contoh dari Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dapat berupa usaha kecil-kecilan seperti kerajinan tangan, usaha kuliner, pertanian, peternakan, atau usaha jasa yang dijalankan oleh individu atau kelompok di masyarakat. Pemerintah dan berbagai lembaga swadaya masyarakat sering memberikan dukungan berupa pelatihan, bimbingan, dan akses ke modal untuk mendorong pelaksanaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

Dana Desa juga dapat dialokasikan untuk program-program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan kewirausahaan, pembentukan Kelompok Usaha

²⁹ Wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues. Pada Tanggal 25 Juni 2024

Bersama (KUB), atau penyediaan sarana dan prasarana pendukung usaha produktif di desa. Dana Desa dapat digunakan untuk memperbaiki atau membangun infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi, seperti pasar desa, pusat produksi, atau jaringan distribusi. Selain itu, dana ini juga bisa dialokasikan untuk peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola usaha melalui pelatihan dan bimbingan teknis.

Penggunaan Dana Desa untuk modal usaha harus dilakukan dengan transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa dana tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat desa dan tidak disalahgunakan. Modal usaha dari Dana Desa diharapkan bisa memicu pertumbuhan usaha yang berkelanjutan, sehingga mampu menciptakan dampak jangka panjang bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini memerlukan perencanaan yang matang, monitoring, dan evaluasi berkala untuk menilai efektivitas penggunaan dana.

Pengelolaan modal usaha dari Dana Desa harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, dengan mempertimbangkan potensi dan kebutuhan spesifik dari masing-masing desa. Jika dikelola dengan baik, modal usaha ini dapat menjadi pendorong utama dalam pembangunan ekonomi desa dan pengurangan kemiskinan di wilayah pedesaan.

4.2.2 Perumahan dan Permukiman (Perkim)

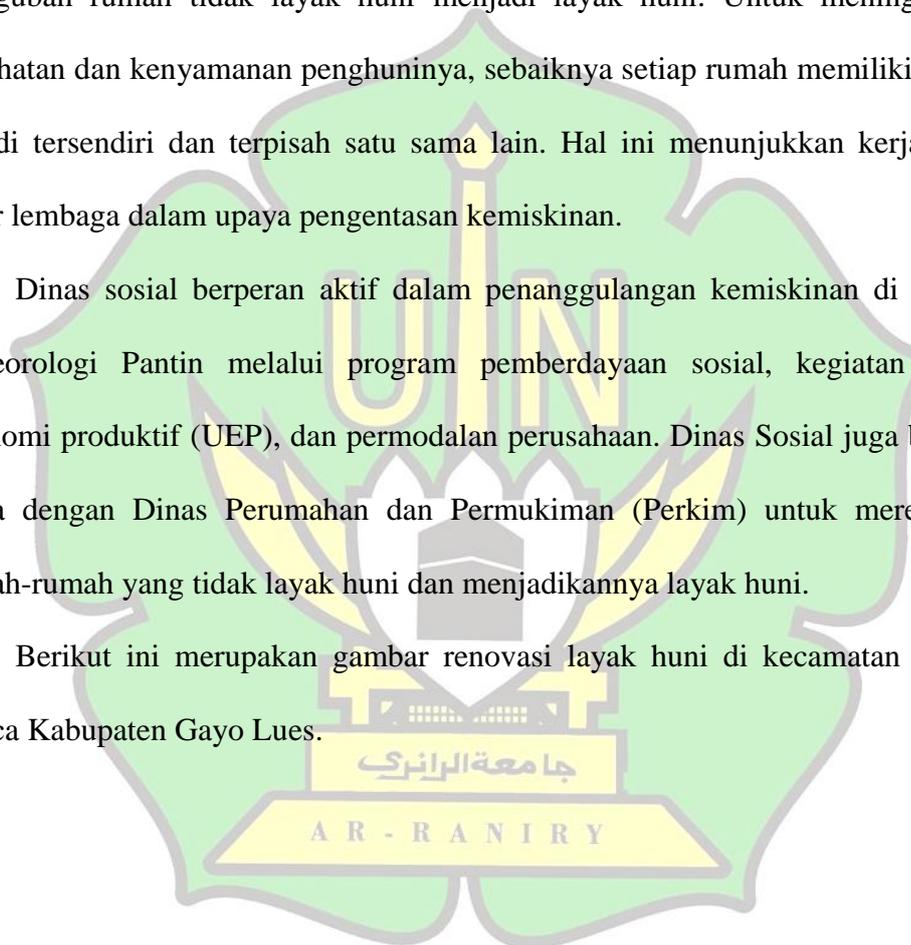
Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) adalah sebuah lembaga pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan

pemerintahan di bidang perumahan dan permukiman. Dinas ini memiliki peran penting dalam perencanaan, pengembangan, pengelolaan, dan pengawasan kebijakan yang berkaitan dengan penyediaan perumahan, pengelolaan kawasan permukiman, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukungnya.

Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) juga berperan penting dalam mengubah rumah tidak layak huni menjadi layak huni. Untuk meningkatkan kesehatan dan kenyamanan penghuninya, sebaiknya setiap rumah memiliki kamar mandi tersendiri dan terpisah satu sama lain. Hal ini menunjukkan kerja sama antar lembaga dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Dinas sosial berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan di Distrik Meteorologi Pantin melalui program pemberdayaan sosial, kegiatan usaha ekonomi produktif (UEP), dan permodalan perusahaan. Dinas Sosial juga bekerja sama dengan Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) untuk merenovasi rumah-rumah yang tidak layak huni dan menjadikannya layak huni.

Berikut ini merupakan gambar renovasi layak huni di kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues.





Gambar 4.2 Renovasi Rumah Tidak Layak Huni

Sumber: Kompasiana, 2021

Dinas ini sering bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta, lembaga internasional, dan masyarakat untuk melaksanakan proyek-proyek perumahan dan permukiman. Kolaborasi ini bertujuan untuk memaksimalkan sumber daya dan keahlian dalam memenuhi kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak. Adanya peranan yang luas dan kompleks, Dinas Perumahan dan Permukiman memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses terhadap perumahan yang layak dan lingkungan hidup yang sehat. Ini menjadi bagian dari upaya yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi ketimpangan sosial di masyarakat.

Adapun strategi yang dijalankan pemerintah di kecamatan pantan cuaca kabupaten gayo lues berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala bidang pemberdayaan sebagai berikut:

“Program kami dalam Mengatasi Kemiskinan Direnovasi rumah tidak layak huni menjadi layak dengan memastikan setiap rumah memiliki kamar mandi perindividu. Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) harus berperan aktif dalam proses renovasi ini. Pemberdayaan sosial dan modal usaha juga diperlukan untuk mengatasi kemiskinan.”³⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Strategi pemerintah untuk mengatasi kemiskinan di wilayah meteorologi Pantin antara lain dengan merenovasi rumah-rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni, dengan fokus menyediakan fasilitas dasar seperti kamar mandi pribadi di setiap rumah. Kementerian Perumahan dan Permukiman (Perkim) mempunyai tanggung jawab utama dalam proses renovasi ini, memastikan setiap rumah memenuhi standar kesehatan dan kenyamanan.

Tujuan renovasi ini tidak hanya untuk meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi masyarakat, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup. Selain retrofit, pemberdayaan sosial dan pemberian modal usaha juga merupakan bagian integral dari strategi pemerintah untuk mengatasi kemiskinan.

Program-program ini bertujuan untuk mendukung masyarakat kurang mampu, memulai usaha kecil, dan meningkatkan pendapatan. Dengan menggabungkan upaya perbaikan rumah dan pemberdayaan ekonomi, pemerintah bertujuan untuk menciptakan solusi holistik dan berkelanjutan untuk mengatasi kemiskinan, memungkinkan masyarakat menjadi mandiri dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah.

³⁰ Wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues. Pada Tanggal 25 Juni 2024

4.2.3 Alokasi Anggaran Dana Desa

Alokasi anggaran Dana Desa di Kecamatan Pantan Cuaca, Kabupaten Gayo Lues, dari tahun 2021 hingga 2023 tidak disebutkan secara spesifik dalam sumber-sumber yang tersedia. Namun, secara umum, alokasi Dana Desa di Kabupaten Gayo Lues setiap tahun terus meningkat sebagai bagian dari upaya pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang menunjukkan skala dukungan finansial yang diberikan kepada desa-desa untuk mengimplementasikan berbagai program pembangunan.³¹

Pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Prioritas penggunaan dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021. Dana desa juga dimanfaatkan untuk program infrastruktur desa dengan mengutamakan penggunaan tenaga kerja dan bahan baku lokal serta program pengembangan desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa.

Dengan demikian, penggunaan dana desa memiliki tujuan yang jelas untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, pelayanan kepada masyarakat desa, pendapatan desa dan masyarakat, serta mendukung program infrastruktur desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa.

Sumber dana desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan

³¹ Bara mendorong merubah news Aceh, pemdes remukut kecamatan pantan cuaca salurkan BLT-DD tahun 2024, 9 juli 2024.

Belanja Daerah kabupaten/kota. Realisasi penyaluran Dana Desa dapat dilihat pada menu dibawah ini dengan memilih wilayah yang ingin dilihat. Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Hal ini didukung dengan hasil wawancara dengan salah satu kepala bidang pemberdayaan sosial yang menyebutkan bahwa:

“Alokasi Anggaran dan Rencana Program Alokasi anggaran untuk program pencegahan fakir miskin mencakup santunan kematian, bantuan untuk janda miskin, Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Kartu Indonesia Pintar (KIP/Beasiswa), dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Rencana program mencakup penyuluhan lingkungan hidup, pertanian, Telkom, kesehatan, infrastruktur, dan perindustrian”.³²

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa Alokasi anggaran untuk program pencegahan fakir miskin di Kecamatan Pantan Cuaca sangat strategis, dengan fokus pada berbagai bentuk bantuan yang dapat membantu masyarakat yang kurang mampu. Beberapa contoh bantuan yang termasuk dalam alokasi anggaran ini adalah santunan kematian, bantuan untuk janda miskin, Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Kartu Indonesia Pintar (KIP/Beasiswa), BPJS, dan rekening listrik.

Alokasi Anggaran dan Rencana Program Alokasi adalah dua konsep penting dalam perencanaan keuangan pemerintah atau organisasi, yang berkaitan dengan pengelolaan dan distribusi sumber daya keuangan untuk mendukung berbagai program dan kegiatan. Alokasi anggaran adalah proses penentuan dan

³² Wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues. Pada Tanggal 25 Juni 2024

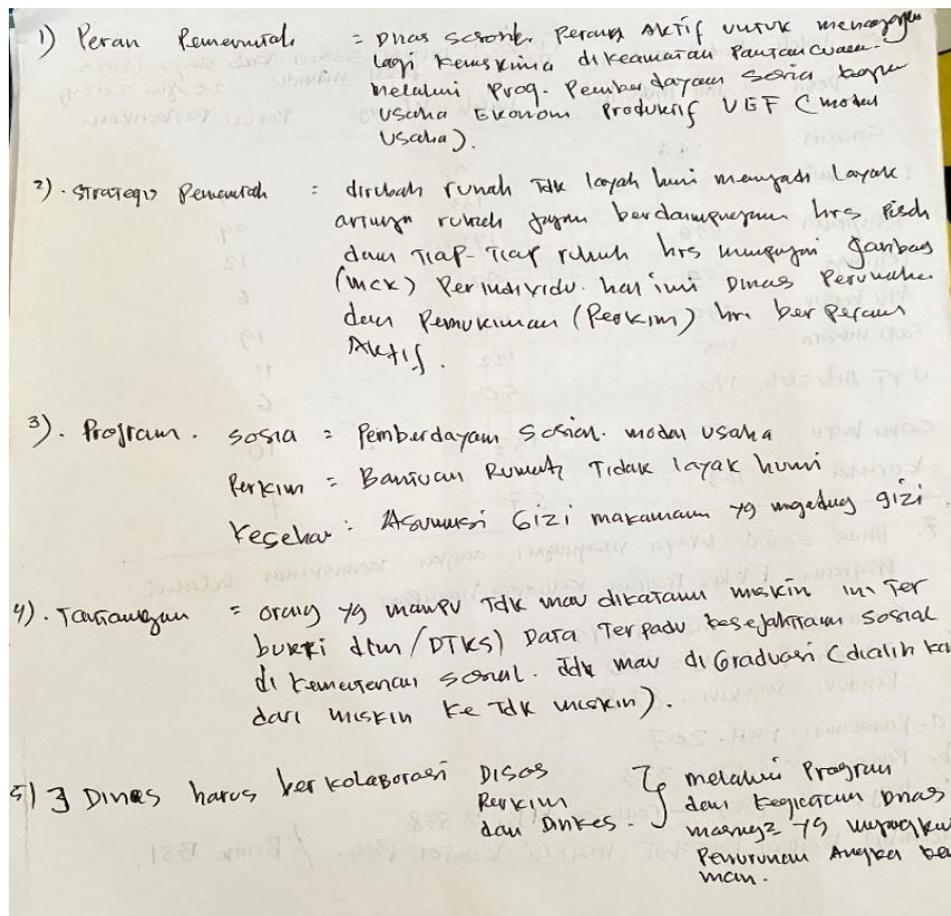
pengaturan anggaran (dana) untuk berbagai pos atau kegiatan dalam satu periode tertentu, seperti satu tahun fiskal. Tujuan utama dari alokasi anggaran adalah memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan.

Selain itu, rencana program juga mencakup berbagai bidang seperti penyuluhan lingkungan hidup, pertanian, Telkom, kesehatan, infrastruktur, dan perindustrian. Dengan memberikan bantuan-bantuan ini, pemerintah berupaya untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Miskin untuk Distribusi Alokasi Bansos 2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Distribusi Alokasi PKH	Realisasi PKH	Distribusi Alokasi Sembako	Realisasi Sembako	Distribusi Alokasi PBI	Realisasi PBI
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
1	Dabungelan	7.267	1.362	372	372	654	634	4.347	4.046
2	Kuta Panjang	10.139	1.726	467	378	827	797	5.507	5.748
3	Blangkejeren	31.924	3.458	939	869	1.660	1.625	11.033	12.927
4	Pantan Cuaca	828	780	225	206	398	376	2.641	2.845
5	Putri Betung	9.684	2.417	657	673	1.157	1.129	7.712	6.799
6	Pining	5.189	1.397	381	344	671	697	4.457	3.616
7	Blang Jerang	7.908	1.264	345	289	606	578	4.033	4.350
8	Rikit Gaib	4.996	930	254	222	445	443	2.965	2.702
9	Blang Pegay	7.314	1.355	370	365	649	646	4.323	4.117
10	Terangun	9.707	2.101	570	461	1.009	1.008	6.703	6.349
11	Tripejaya	9.181	1.387	377	381	664	669	4.424	4.217
Jumlah		104.089	18.225	4957	4560	8.740	8.602	58.145	57.716

Sumber Data: Dinas Sosial Kabupaten Gayo Lues, 2024



Gambar 4.3 Data Wawancara Dari Dinas Sosial Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues
Sumber data: Dinas Sosial KAB Gayo Lues 2024

Berdasarkan data wawancara dari Dinas Sosial Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues didapatkan bahwa peran pemerintah sangatlah penting untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi di masyarakat dapat berkembang secara berkelanjutan, memberikan manfaat maksimal bagi pelaku usaha, serta berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah juga bertanggung jawab dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), seperti kebijakan fiskal, peraturan perpajakan, insentif untuk usaha kecil dan menengah, serta regulasi yang melindungi pelaku usaha dari persaingan tidak sehat.

Hasil wawancara dengan kepala desa seneren Zakaria, menyebutkan bahwa:

“Menurut saya pemerintah berperan penting dalam mengurangi kemiskinan di desa dengan melaksanakan berbagai program, memberikan bantuan, dan bekerja sama dengan lembaga terkait untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah berperan penting dalam berbagai program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup, dan memastikan distribusi kesejahteraan yang merata. Pemerintah berperan dalam merumuskan kebijakan yang mendukung berbagai program pembangunan, seperti program pengentasan kemiskinan, peningkatan akses pendidikan, dan pembangunan infrastruktur. Selain itu, pemerintah mengimplementasikan program-program nasional yang berskala besar, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) untuk kesejahteraan sosial, atau Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan”³³

Pemerintah dapat melakukan ini dengan melaksanakan berbagai program, memberikan bantuan, dan bekerja sama dengan berbagai lembaga. Melalui program-program tersebut, pemerintah dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Program-program ini bisa mencakup pelatihan keterampilan, pemberian modal usaha, peningkatan akses ke jalan pendidikan dan layanan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur. Dengan cara ini, masyarakat desa dapat mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan keluar dari kemiskinan.

Pemerintah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program untuk memastikan bahwa mereka berjalan sesuai rencana dan mencapai sasaran yang ditetapkan. Evaluasi berkala dilakukan untuk menilai efektivitas program dan menentukan perlu tidaknya penyesuaian. Dalam program-program yang melibatkan kepatuhan terhadap regulasi, seperti program lingkungan hidup atau

³³ Hasil Wawancara dengan Zakaria sebagai Kepala desa Seneren Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues. Pada Tanggal 26 Juni 2024

kebijakan anti-korupsi, pemerintah berperan dalam penegakan hukum untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berikut ini merupakan gambar penerima bantuan di Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues:



Gambar 4.4 Penerima Bantuan
Sumber: Bara News Aceh 2024

Hal tersebut sebagaimana didukung dengan pernyataan Kepala Desa kuning kurnia Abdul Hamid dengan Kepala Desa Cane Baru Samsul Bahri menyebutkan bahwa:

“Pemerintah menerapkan strategi untuk mengurangi kemiskinan di desa dengan melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara, serta memberdayakan masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis melalui program penyediaan kebutuhan pokok, pengembangan sistem jaminan sosial, dan pengembangan budaya usaha. Kinerja pemerintah dinilai dari penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup, meskipun tantangan seperti kondisi alamiah, ekonomi, struktural, sosial, dan kultural masih ada; untuk mengatasinya, pemerintah perlu menciptakan kesempatan kerja, lapangan kerja dan menumbuhkan swadaya setempat, serta meningkatkan efektivitas program dengan bekerja sama dengan lembaga terkait dan memanfaatkan data yang akurat.”³⁴

³⁴ Hasil wawancara dengan kepala desa Kuning Kurnia Abdul Hamid dan kepala desa Cane Baru Samsul Bahri Pada Tanggal 26 Juni 2024

Berdasarkan wawancara di atas, didapatkan bahwa untuk mengurangi kemiskinan di desa, pemerintah menerapkan berbagai strategi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan pendapatan, dan mengatasi masalah-masalah yang menyebabkan kemiskinan. Pemerintah juga mengembangkan sistem jaminan sosial dan pengembangan budaya usaha. Jaminan sosial adalah sistem yang dirancang untuk melindungi individu dan keluarga dari risiko sosial dan ekonomi yang dapat mempengaruhi kesejahteraan mereka. Sistem ini memberikan perlindungan dalam situasi di mana seseorang mengalami kehilangan pendapatan, kesulitan ekonomi, atau risiko kesehatan. Jaminan sosial biasanya mencakup beberapa komponen utama, yang dapat berbeda-beda antar negara.

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan Program yang menyediakan layanan kesehatan bagi seluruh penduduk, biasanya melalui asuransi kesehatan yang dikelola oleh badan pemerintah atau lembaga khusus seperti BPJS Kesehatan di Indonesia. Layanan Kesehatan Preventif dan Kuratif yang menyediakan akses ke pelayanan kesehatan preventif (seperti vaksinasi) dan kuratif (seperti pengobatan penyakit).

Program bantuan sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) yaitu bantuan keuangan yang langsung diberikan kepada keluarga miskin untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Selain itu, ada juga Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu memberikan bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang membutuhkan dengan syarat tertentu seperti memastikan anak-anak mereka bersekolah dan mengikuti pemeriksaan kesehatan. Ada juga

Bantuan Pangan dan Kesehatan yang menyediakan bantuan pangan dan program kesehatan untuk meningkatkan gizi dan kesehatan masyarakat desa.

Informasi lainnya juga peneliti peroleh dengan mewawancarai masyarakat terkait dengan peran pemerintah masyarakat yang menyebutkan bahwa:

“Kami merasa terlibat dalam beberapa program pemerintah seperti penyediaan kebutuhan pokok dan bantuan sosial, namun masih ada kendala dalam mengakses dan efektivitas program perlu ditingkatkan, terutama dalam penyaluran bantuan yang tepat sasaran dan berdampak langsung pada masyarakat. Kendala yang dialami termasuk sulitnya akses data yang akurat, validasi yang tepat, dan perbedaan besar dalam besaran bantuan di berbagai daerah. Ada kebutuhan untuk peningkatan akses layanan dasar, infrastruktur di wilayah pesisir, dan program produktif untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.”³⁵

Masyarakat merasa terlibat dalam berbagai program pemerintah, seperti penyediaan kebutuhan pokok dan bantuan sosial. Namun, mereka masih menghadapi beberapa masalah dalam mengakses program tersebut dan efektivitasnya perlu ditingkatkan. Salah satu masalah utama adalah sulitnya mendapatkan data yang akurat dan melakukan validasi yang tepat. Selain itu, ada perbedaan besar dalam jumlah bantuan yang diterima di berbagai daerah, yang mengakibatkan beberapa orang tidak mendapatkan bantuan yang seharusnya. Untuk itu, ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan akses terhadap layanan dasar, memperbaiki infrastruktur di daerah pesisir, dan menciptakan program-program yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Hal tersebut sebagaimana didukung dengan pernyataan masyarakat yang menyebutkan bahwa:

³⁵ Hasil wawancara dengan Binti Asiah dan Julfan sebagai tokoh masyarakat desa Cane Baru pada tanggal 26 juni 2024

“Kami berharap pemerintah dapat meningkatkan peranannya dengan memperbaiki sistem perencanaan dan penganggaran yang lebih berpihak pada masyarakat miskin serta memanfaatkan data yang akurat dan efektif. Dengan mengimplementasikan strategi-strategi ini, pemerintah dapat meningkatkan kapasitas anggaran untuk mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan publik, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat sistem jaminan sosial.”³⁶

Masyarakat berharap pemerintah dapat berperan lebih aktif dengan memperbaiki cara perencanaan dan penganggaran yang lebih berpihak pada mereka yang kurang mampu. Dengan memanfaatkan data yang tepat dan efektif, pemerintah bisa merancang program-program yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jika semua ini dilakukan, diharapkan bantuan yang diberikan akan lebih tepat sasaran dan memberikan dampak positif yang nyata bagi kehidupan sehari-hari masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan sangat penting, terutama melalui program pemberdayaan sosial dan kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) serta modal usaha. Pemerintah juga bekerja sama dengan Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) untuk merenovasi rumah-rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni, memastikan setiap rumah memiliki kamar mandi pribadi untuk meningkatkan kesehatan dan kenyamanan penghuninya.

³⁶ Hasil wawancara dengan Asbi dan Kamisan sebagai tokoh masyarakat desa Seneren pada tanggal 26 juni 2024

Strategi yang dijalankan mencakup renovasi rumah tidak layak huni, pemberdayaan sosial, dan modal usaha. Selain itu, alokasi anggaran untuk program pencegahan kemiskinan meliputi berbagai bentuk bantuan seperti santunan kematian, bantuan untuk janda miskin, Usaha Ekonomi Produktif (UEF), Kartu Indonesia Pintar (KIP/Beasiswa), BPJS, dan rekening listrik. Rencana program juga mencakup penyuluhan lingkungan hidup, pertanian, kesehatan, infrastruktur, dan perindustrian.

Wawancara dengan beberapa kepala desa dan masyarakat setempat menunjukkan bahwa masyarakat merasa terlibat dalam beberapa program pemerintah, namun masih ada kendala dalam mengakses dan efektivitas program tersebut. Ada kebutuhan untuk meningkatkan akses terhadap layanan dasar, memperbaiki infrastruktur, dan menciptakan program produktif yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Masyarakat berharap pemerintah dapat memperbaiki sistem perencanaan dan penganggaran yang lebih berpihak pada mereka yang kurang mampu serta memanfaatkan data yang akurat untuk merancang program-program yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Dalam upaya mengurangi angka kemiskinan, pemerintah sering menghadapi berbagai kendala yang dapat mempengaruhi efektivitas program-program pengentasan kemiskinan. Kendala utama yang sering dihadapi pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan yaitu anggaran pemerintah sering kali terbatas dan harus dibagi untuk berbagai kebutuhan, sehingga dana untuk program pengentasan kemiskinan tidak memadai. Terkadang anggaran

lebih difokuskan pada sektor lain, seperti infrastruktur atau pertahanan, yang mengurangi alokasi untuk program pengentasan kemiskinan.

Proses administratif yang rumit dan birokrasi yang berbelit-belit dapat menghambat implementasi program dan mengurangi efektivitas distribusi bantuan. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam aparat pemerintah daerah dapat mempengaruhi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. Selain itu, kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah yang terlibat dalam pengentasan kemiskinan dapat mengurangi efektivitas program. Kurangnya integrasi dan sinergi antara berbagai program pemerintah dapat mengakibatkan tumpang tindih atau kekurangan dalam pelaksanaan program serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program dapat mengakibatkan ketidaksesuaian program dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Perubahan kebijakan yang sering atau tidak konsisten dapat membingungkan pelaksana dan masyarakat yang terlibat dalam program pengentasan kemiskinan. Mengatasi kendala-kendala ini memerlukan pendekatan yang holistik dan terkoordinasi, termasuk perbaikan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Upaya untuk melibatkan masyarakat secara aktif dan memperkuat kapasitas lembaga-lembaga yang terlibat juga penting untuk memastikan keberhasilan program pengentasan kemiskinan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pada bab ini merupakan hasil dan kesimpulan dalam penelitian Peran Pemerintah dalam Mengurangi Angka Kemiskinan di Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues.

Pemerintah Kabupaten Gayo Lues telah menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam upaya mengurangi angka kemiskinan sesuai dengan regulasi yang berlaku dan terdapat strategi Pemerintah Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues jalankan yaitu seperti program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh kelompok usaha untuk meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja. Tujuan utama UEP adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan bantuan modal dan sumber daya yang diperlukan. Program UEP biasanya melibatkan kelompok usaha bersama Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah kelompok yang terdiri dari beberapa individu atau keluarga yang bergabung untuk menjalankan usaha ekonomi secara bersama-sama. Tujuan utama adalah meningkatkan pendapatan anggotanya melalui kegiatan ekonomi yang produktif dan berkelanjutan. KUBE biasanya mendapatkan bantuan dari pemerintah, baik dalam bentuk modal, pelatihan, maupun pendampingan, untuk mendukung usaha mereka agar lebih produktif dan menguntungkan. dan memberikan bantuan uang untuk mendukung produktivitas usaha.

Modal Usaha, Perumahan, dan Permukiman (Perkim) adalah sumber daya yang diperlukan untuk membangun infrastruktur dan fasilitas yang mendukung kegiatan ekonomi dan perumahan. Alokasi Anggaran yang berhubungan dengan UEP dan Perkim sangat penting untuk memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan secara efektif dan efisien. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat meningkatkan kemampuan memfasilitasi kegiatan ekonomi dan pembangunan perumahan yang layak huni.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan beberapa saran untuk strategi pemerintah dalam mengatasi kemiskinan di Kecamatan Pantan Cuaca:

1. Optimalisasi Alokasi Dana

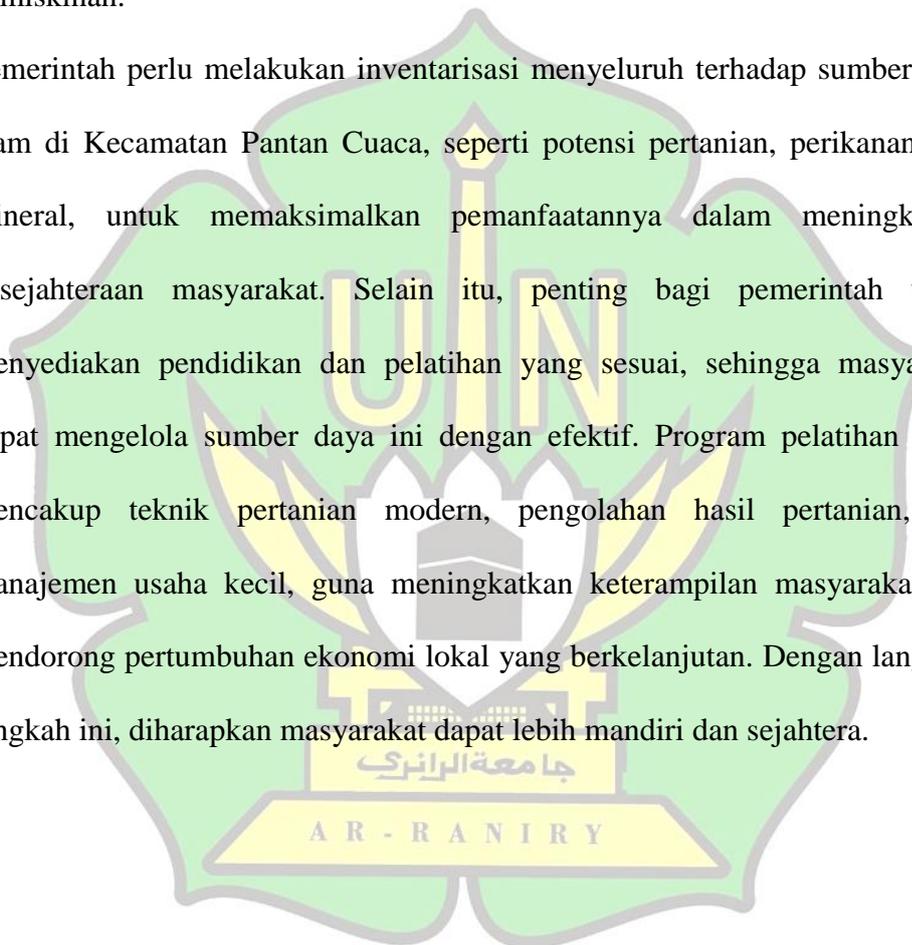
Pemerintah diharapkan dapat mengoptimalkan alokasi dana untuk penanganan kemiskinan secara lebih efisien. Penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor kunci yang dapat memberikan kontribusi maksimal dalam mengatasi kemiskinan dengan fokus pada aspek-aspek yang substansial.

2. Partisipasi Aktif Masyarakat

Diharapkan adanya partisipasi aktif dari masyarakat dalam program-program pemerintah yang bertujuan mengatasi kemiskinan. Keterlibatan masyarakat tidak hanya dianggap sebagai elemen pendukung, tetapi juga sebagai faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan dan keberhasilan penanggulangan kemiskinan. Dengan melibatkan masyarakat, program-program ini dapat lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pemerintah dapat lebih efektif dalam mengurangi angka kemiskinan di Kecamatan Pantan Cuaca dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Upaya yang terintegrasi antara perbaikan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan pendidikan akan menciptakan solusi yang lebih holistik dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah kemiskinan.

3. Pemerintah perlu melakukan inventarisasi menyeluruh terhadap sumber daya alam di Kecamatan Pantan Cuaca, seperti potensi pertanian, perikanan, dan mineral, untuk memaksimalkan pemanfaatannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk menyediakan pendidikan dan pelatihan yang sesuai, sehingga masyarakat dapat mengelola sumber daya ini dengan efektif. Program pelatihan harus mencakup teknik pertanian modern, pengolahan hasil pertanian, dan manajemen usaha kecil, guna meningkatkan keterampilan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mandiri dan sejahtera.



DAFTAR PUSTAKA

- Agasi, A. (2023, April). Peran pemerintah dalam pengetasan kemiskinan di Kota Medan. *In Seminar Nasional Lppm Ummat* (Vol.2, pp.247).
- Arsjad, M. F., Hunawa, R., Nuna, M., & Walahe, D. (2022). Peranan Pemerintah Desa dalam Penanggulangan Kemiskinan di Desa Buntulia Jaya Kecamatan Duhiyadaa. *Economics and Digital Business Review*, 3(2), 379-396.
- Anggleni, A. (2018). Implementasi Kebijakan Program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 1(1), 24-39.
- Aesah, S., Harsono, Y., & Jaswita, D. I. (2020). Pemberdayaan Difabel Melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Di Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat. *Derivatif: Jurnal Manajemen*, 14(2).
- Bara mendorong merubah news Aceh, pemdes remukut kecamatan pantan cuaca salurkan BLT-DD tahun 2024, 9 juli 2024.
- Dialeksis tajam dan strategis, “Ini 10 Kabupaten/Kota Termiskin Di Aceh, Aceh Singkil Nomor 1, 11 April 2023.
- Diskom NF, Penyerahan Bnatuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bentuk Keperdulian Pemerintah Kepada Penyandang Disabilitas, Artikel, 30 April 2024
- Harefa P A. (2022). Peran Pemerintah Dalam Mengurangi Angka Kemiskinan. *Jurnal El-Thawalib*,3(2),363-374.
- Henrichard Jordy Sunkudon, Perana United High Commissioner For Refugees (Unhcr) Dalam Menangani Pengungsi Etnis Rohingya Di Indonesia, jurna jurusan ilmu pemerintah, volume 1 no. 1 tahun 2018
- Keyword: poverty, Women, Multiple Classification Analysis,” *laporan pengukuran kemiskinan aceh tahun 2021*”, *Badan perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Aceh 2021.Hlm 3,4,5.*
- Mufidah, R., Asrudi, A., & Susiani, S. (2022). Pertumbuhan ekonomi dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan. *Jurnal Education and Development*, 10(2), 521-527.

- Milenia, V. A., Kurnianingsih, F., & Okparizan, O. (2022). *Evaluasi Inovasi Pelayanan Melalui Sistem Pelaporan Penerangan Jalan Umum (Silajang) Di Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Pertamanan Kota Tanjungpinang* (Doctoral dissertation, Universitas Maritim Raja Ali Haji).
- Mulyadi, M. (2017). Peran pemerintah dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan dalam masyarakat. *Kajian*, 21(3), 221-236.
- Nirwana, D. C., Muhammadiyah, M., & Hasanuddin, M. (2017). Peran pemerintah dalam pembinaan usaha kecil menengah di Kabupaten Enrekang. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 3(1), 01-14.
- Nordiawan, D., Putra, I. S., & Rahmawati, M. (2007). Akuntansi Pemerintah. *Jakarta: Salemba Empat*, 1, 1-40.
- Novita, E. (2023). Implementasi Kebijakan Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Tahun 2021 (Studi kasus di Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 8(4).
- Pureklolon, T. T. (2020). *Perilaku Politik*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Rahman, F. (2018). *Teori Pemerintahan*. Universitas Brawijaya Press.
- Samud, S. (2018). Peranan Pemerintah Dalam Mensejahterakan Masyarakat Melalui Bantuan Sosial Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, 10(2), 215-228.
- Siti Hajra (2022) *Penanggulangan Kemiskinan: Antar Pemerintah dan Masyarakat di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare (Perspektif Ekonomi Islam)*
- Siregar, B. S., & Jaffisa, T. (2020). Peranan pemerintah dalam pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (umkm) di desa laut dendang. *Publik Reform: Jurnal Administrasi Publik*, 7(1), 8-14.
- Sjafari, A. (2023). Menurunkan Angka Kemiskinan Melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Niara*, 16(1), 1-13.
- Soekanto, S. (2006). *Teori Peran Dalam Ilmu Hubungan Internasional*.
- Sutawijaya, A. (2012). Pengaruh faktor-faktor ekonomi terhadap inflasi di Indonesia. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, 8(2), 85-101.
- Wani, M. H. (2022). *Sejarah Pemekaran Kabupaten Gayo Lues Peluang dan Tantangan* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).

Lampiran 1

Informan Kepala Bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin (Dinas Sosial)

1. Bagaimana Bapak melihat peran pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan di masyarakat Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues?
2. Apa strategi yang digunakan oleh pemerintah untuk mengurangi kemiskinan di masyarakat Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues?
3. Apa kebijakan dan program yang sudah dilakukan pemerintah dalam mengurangi kemiskinan di masyarakat Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues?
4. Apa tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mengurangi kemiskinan di masyarakat Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues?
5. Bagaimana evaluasi yang dilakukan terhadap program-program penanggulangan angka kemiskinan di Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues?
6. Berapakah jumlah penduduk miskin di Kecamatan Pantan Cuaca dan kecamatan Pantan Cuaca termasuk urutan termiskin berapa di Kabupaten Gayo Lues?
7. Sejauh mana dinas yang bapak pimpin terlibat dalam upaya mengurangi angka kemiskinan masyarakat Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues?
8. Apa program utama yang telah diimplementasikan oleh dinas dalam menangani masalah kemiskinan di Kecamatan Pantan Cuaca?
9. Bagaimana alokasi anggaran dinas untuk program-program penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Pantan Cuaca dan bagaimana pengawasan terhadap penggunaannya?
10. Bagaimana dinas bekerja sama dengan instansi lain baik pemerintah maupun non-pemerintah, dalam mengatasi kemiskinan di Kecamatan Pantan Cuaca?
11. Apa rencana atau program yang akan dilaksanakan oleh dinas dalam waktu dekat untuk meningkatkan efektivitas upaya mengurangi kemiskinan di Kecamatan Pantan Cuaca?

Informan Tokoh Kepala Desa

1. Bagaimana Bapak melihat peran pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan di desa Cane Baru?
2. Bagaimana peran kepala desa untuk mengurangi angka kemiskinan di desa Cane Baru?
3. Bagaimana Bapak menilai kinerja masyarakat dalam mengurangi kemiskinan di desa ini?
4. Apa tantangan yang dihadapi masyarakat dalam mengurangi kemiskinan di desa Cane Bru, dan bagaimana Bapak mengatasi tantangan tersebut?
5. Bagaimana Bapak berharap pemerintah dapat meningkatkan perannya dalam mengurangi kemiskinan di desa tersebut?

Informan tokoh masyarakat:

1. Sejauh mana Bapak merasa terlibat dalam program-program pemerintah yang bertujuan mengurangi angka kemiskinan di desa ini?
2. Bagaimana menurut Bapak efektivitas program-program yang telah diterapkan oleh pemerintah dalam membantu masyarakat kurang mampu keluar dari kondisi kemiskinan?
3. Apa saja kendala atau hambatan yang Bapak alami dalam mengakses bantuan atau program-program yang disediakan oleh pemerintah untuk mengatasi kemiskinan?
4. Menurut Bapak, apakah ada kebutuhan atau masalah tertentu yang belum tercakup dalam program-program pemerintah terkait dengan penanggulangan kemiskinan di wilayah tersebut?
5. Bagaimana harapan Bapak terhadap peran pemerintah dalam membantu masyarakat kurang mampu mengatasi kemiskinan di masa mendatang?

Lampiran 2 Surat Penelitian

Surat Izin Penelitian Mahasiswa



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1047/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/06/2024
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gayo Lues
2. Kepala Desa Seneren
3. Kepala Desa Kuning Kurnia
4. Kepala Desa Cane Baru
5. Masyarakat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **KALIDA MUNASTRI / 200801032**
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Politik
Alamat sekarang : Jalan inong bale, lorong bayeun, Darussalam, Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Peran Pemerintah dalam Mengurangi Angka Kemiskinan di Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 12 Juni 2024
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 14 November
2024*

Eka Januar, M.Soc.Sc.

Lampiran 3

DOKUMENTASI WAWANCARA



**Wawancara Penelitian dengan Kepala Dinas
Kecamatan Pantan Cuaca Kabupaten Gayo Lues**



**Wawancara Penelitian dengan Tokoh Masyarakat
di Kampung Cane Baru**



Wawancara Penelitian Denga Kepala Desa Kuning Kurnia Ndan Cane Baru



Wawancara Penelitian dengan Tokoh Masyarakat Kampung Seneren



Wawancara Penelitian dengan Kepala Desa Dan Tokoh Masyarakat di Kampung Seneren



**Wawancara Penelitian dengan Tokoh Masyarakat
Kampung Kuning Kurnia**



**Wawancara Penelitian dengan Tokoh
Masyarakat di Kampung Seneren**